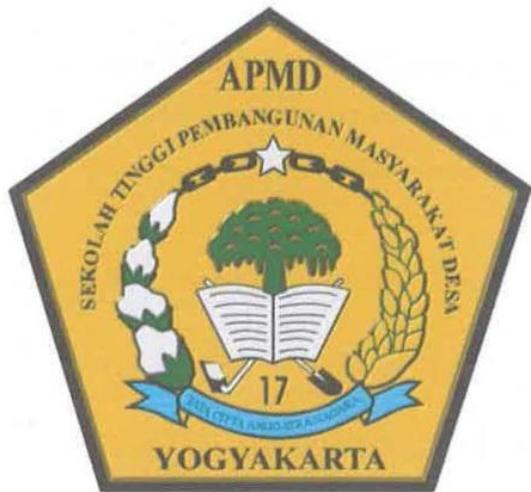


## SKRIPSI

### FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGUATAN EKONOMI KREATIF MELALUI KELOMPOK PEREMPUAN

(*Studi Kasus Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, DIY*)



Disusun Oleh:

EYLING DELFIA SAMALOISA

21520016

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STARATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA

2025



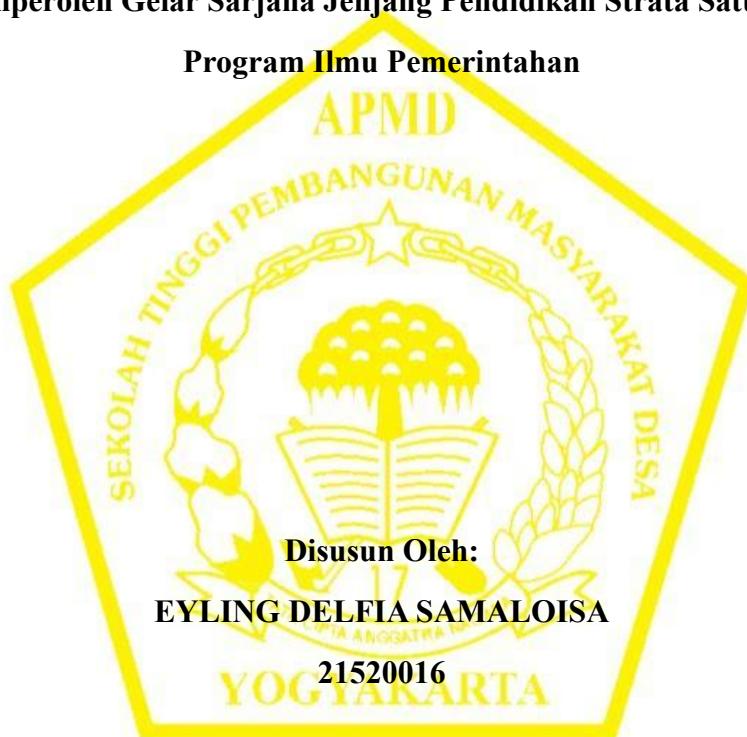
## **HALAMAN JUDUL**

# **FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGUATAN EKONOMI KREATIF MELALUI KELOMPOK PEREMPUAN**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**

**Program Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 03 Juli 2025**

**Waktu : 11.00-12.00 WIB**

**Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta**

### TIM PENGUJI

**Nama**

**Tanda Tanagan**

Utami Sulistiana, S.P, M.P  
Ketua Penguji/Pembimbing

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP, M.A  
Penguji Samping I

Minardi, S.IP., M.Sc  
Penguji Samping II

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**(Dr. Gregorius Sahdan, S.IP, M.A)**

## HALAM PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eyling Delfia Samaloisa

Nim : 21520016

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Penguanan Ekonomi Kreatif " adalah benar-benar karya tulis sya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Sumber-sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kesamaan atau kecurangan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Eyling Delfia Samaloisa  
NIM : 21520016  
Telp : 081328272695  
Email : [cylingsamaloisa@gmail.com](mailto:cylingsamaloisa@gmail.com)  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"  
Yogyakarta.

Dengan ini memberikan izin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:  
**"Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Perempuan (Studi Kasus di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman)"**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) .

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 22 Juni 2025  
Yang Membuat Pernyataan

  
**Eyling Delfia Samaloisa**  
21520016

## **MOTTO**

” Mintaklah, Maka Akan Diberikan Kepadamu, Carilah, Maka Kamu Akan Mendapatkannya, Ketoklah, Maka Pintu Akan Dibukakan Padamu”

(Matius 7:7)

” Karena Masa Depan Sungguh Ada, Dan Harapanmu Tidak Akan Hilang”

(Amsal 23:18)

” Sesibuk Apapun Kamu, Jangan Pernah Lupa Berdoa dan Beribadah,

Tetap Andalkan Tuhan Disetiap Prosesmu ”

-mamak-

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat tuntutan dan perlindungan sehingga saya bisa mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dengan caranya masing-masing, akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa terimakasih skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi , Bapak Eduar Samaloisa dan Mama Pirna Sakerebau. Kepada saudara kandung saya, Adik Ratih samaloisa dan Adik Ones Samaloisa. Saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas segala doa, dukungan, serta semangat yang tidak ada hentinya untuk saya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ke jenjang sarjana ini dengan baik. Sekali lagi terimakasih untuk kedua orang tua saya atas pengorbanan kalian selama ini yang selalu berusaha bekerja keras untuk saya. Dalam penyelesaian skripsi yang ke tidak sempurnaan ini, saya meminta maaf mungkin tidak sebanding dengan hasil keringat Bapak sama Mama berikan selama ini.
2. Untuk keluarga besar saya yang ada dikampung baik dari keluarga Bapak dan Mama yang tidak saya ucapkan namanya satu-persatu, terima kasih atas doa dan dukungan serta semangat untuk saya, sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawab yaitu skripsi saya.

3. Untuk saudara saya juga dari seberang timur (NTT), Abang Riki, Abang Julian, Putri, Abang Stenly, terima kasih sudah memberikan dukungan serta semangat untuk saya.
4. Terima kasih buat group tiktokers sekaligus teman seperjuangan saya, Yohana Grace, Reni Alfianti, Marlis, Aulia, dan Viany asry. Sudah mendukung dan menyemangati saya selama proses skripsi ini.
5. Terima kasih buat teman-teman anggota Padus STPMD'APMD mungkin tidak bisa sayaucapkan namanya satu-persatu.
6. Untuk keluarga lama kost putri pusrita, Bunda zee, mba Reyhana, camelia serta yang lainnya. Terima kasih sudah menjadi teman atau keluarga yang sudah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
7. Terima kasih kepada group ghibahcoree, mak nurlenda dan mak shintia karena sudah menjadi teman cerita.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan saya di Kampus APMD yang tanpa sebutkan namanya satu-persatu dimanapun kalian berada, semoga kita dalam keadaan sehat selalu.
9. Untuk keluarga yang ada disumba Bapak Daud, Mama Desi, Adik Mardi dan Adik Londy. Terima kasih atas segala doa, dukungan, serta semangat untuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada kekasihku tersayang Kurniawan Sandi Umbu Data yang selalu memberikan doa, dukungan, baik materi dan semangat untuk saya, yang selalu ada dalam suka maupun duka. Terimakasih buat semua kebaikanmu selama berproses hingga sampai sekarang ini, terimakasih sudah menjadi

bagian dari perjalanan hidup saya. Semoga Tuhan mengganti berkali-kali  
lipat dan seukses selalu kedepannya buat kita berdua...Aminn

11. Mungkin saya belum sehebat orang lain, tetapi apresiasi diri sendiri itu  
harus. terimakasih sudah kuat dan bertahan sampai saat ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat yang diberikan sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Penguatan Ekonomi Kreatif Melalui Kelompok Perempuan di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman”**

dapat terselesaikan dengan baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjan Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak baik dari secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta
3. Bapak Dr. Gregorius Shadan, S.I.P.,M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membantu serta membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada Dosen Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP, M.A dan Bapak Minardi, S.IP., M.Sc, Terima kasih atas saran dan masukannya selama menguji serta membimbing saya sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak, Ibu Dosen dan semua civitas akademik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada saya selama menuntut ilmu dikampus ini.
7. Pemerintah Kalurahan Wonokerto dan Masyarakat Wonokerto sebagai tempat penelitian skripsi yang telah memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun teknik penyajian. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik yang solutif guna perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 22 Juni 2025  
Penulis

**Eyling Delfia Samaloisa**  
**21520016**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAM PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Literatur Review .....	8

G. Kerangka Konseptual.....	16
1. Pemerintah Desa .....	16
2. Ekonomi Kreatif.....	19
3. Pemberdayaan Perempuan .....	20
4. Fasilitasi .....	21
H. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Objek Penelitian.....	25
3. Subjek Penelitian .....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
5. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB II PENGUATAN EKONOMI KREATIF MELALUI KELOMPOK PEREMPUAN DI KALURAHAN WONOKERTO .....</b>	<b>32</b>
A. Ekonomi Kreatif di Kalurahan Wonokerto.....	32
B. Kondisi Geografis .....	41
C. Kondisi Demografi Kalurahan.....	44
D. Kondisi Sosial Ekonomi Kalurahan Wonokerto .....	48
E. Sarana Prasaraan Kalurahan .....	54
F. Pemerintah Kalurahan .....	60

## **BAB III FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN WONOKERTO**

### **DALAM PENGUATAN EKONOMI KREATIF MELALUI**

### **KELOMPOK PEREMPUAN ..... 70**

A. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan melalui Dukungan Anggaran.....	71
B. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan melalui Program dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.....	84
C. Dinamika dan Tantangan Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Ekonomi Kreatif.....	101

### **BAB IV PENUTUP ..... 110**

A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Deskripsi Informan.....	26
Tabel 2. 1 Penggunaan lahan Eksisting Kalurahan Wonokerto .....	43
Tabel 2. 2 Organisasi Kemasyarakatan .....	49
Tabel 2. 3 Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum.....	55
Tabel 2. 4 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pendidikan.....	57
Tabel 2. 5 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Kesehatan .....	58
Tabel 2. 6 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Peribadatan.....	59
Tabel 2. 7 Jumlah Sebaran Fasilitas Perekonomian .....	60
Tabel 2. 8 Data Keanggotaan Pemerintah Kalurahan Wonokerto .....	63
Tabel 3.1 Alokasi APBKal Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	73

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Produk kuliner Dodol Salak .....	39
Gambar 2. 2 Produk kerajinan Batik motif salak Pondoh.....	40
Gambar 2. 3 Grafik Pembagian Wilayah Padukuhan, RW/RT Kalurahan Wonokerto .....	42
Gambar 2. 4 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Gambar 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	46
Gambar 2. 6 Data Penduduk Menurut Pencaharian .....	47
Gambar 3.1 Alokasi Anggaran dalam APBKal .....	78
Gambar 3.2 Pelaksanaan pelatihan pembuatan Manik-manik PKK .....	80
Gambar 3.3 Produk Olahan Salak .....	82
Gambar 3.4 Alokasi Anggaran Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.....	86
Gambar 3.5 Pelaksanaan Bazar hasil Ekonomi Kreatif .....	94
Gambar 3.6 Pelatihan Pengemasn pelaku UMKM .....	95
Gambar 3.7 Keterlibatan Perempuan dalam Muskal .....	96
Gambar 3.8 Website Sistem Informasi Desa Kalurahan Wonoketro (SIDEWO)	99

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam penguatan ekonomi kreatif melalui kelompok perempuan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada fasilitasi pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam penguatan ekonomi kreatif, Pemberdayaan Perempuan di Kalurahan Wonokerto dan Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Fasilitasi Pemerintah Kalurahan. Penelitian didasari pada ketertarikan peneliti pada kalurahan yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan kapasitas ekonomi masyarakat, terutama perempuan. Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif perempuan dalam sektor ekonomi kreatif. Namun, masih ditemukan berbagai kendala seperti terbatasnya akses pasar, lemahnya daya tawar dalam memasarkan produk, serta minimnya inovasi baik dari sisi kualitas produk maupun pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran.

Metode penelitian yang digunakan peniliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Eksploratif. Dengan demikian peneliti dapat mengekspolarasi suatu fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat dalam rangka menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian di Kalurahan Wonokerto. Teknik Pengumpulan datanya melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam menentukan Informan, teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah, Lurah, Carik, Kamitowo, BPKal, Desa Prima, Pokdarwis, Pelaku UMKM, dan masyarakat. Selanjutnya menggunakan teknik analisis data melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

Hasil temuan peneliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam penguatan ekonomi kreatif melalui kelompok perempuan telah dilakukan melalui pelatihan, bantuan sarana, serta partisipasi dalam pameran. Namun, fasilitasi tersebut belum berbasis perencanaan strategis dan cenderung reaktif terhadap aspirasi masyarakat. Hambatan utama terletak pada kurangnya konsistensi peserta pasca-pelatihan, rendahnya kepercayaan diri, serta keterbatasan pemasaran. Meskipun anggaran dan dukungan kelembagaan tersedia, masih dibutuhkan pendekatan fasilitasi yang lebih integratif dan berkelanjutan untuk memperkuat peran perempuan dalam ekonomi kreatif secara mandiri.

**Kata kunci : Fasilitasi, Pemerintah Kalurahan, Ekonom Kreatif, Kelompok Perempuan.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Kalurahan (Desa) memiliki peran strategis dalam mengembangkan kapasitas ekonomi masyarakat, terutama perempuan. Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi kreatif. Melalui pembentukan kelompok perempuan, pemerintah dapat menciptakan wadah yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya.

Salah satu peran utama pemerintah desa adalah memberikan perlindungan. Perlindungan ini mencakup memastikan bahwa setiap warga dapat memperoleh akses terhadap modal, pendidikan, informasi, peluang usaha, dan sumber daya alam. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat luas dari dominasi atau eksloitasi oleh segelintir orang.

Hadirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan peluang kepada desa untuk melakukan sistem pemerintahan yang mandiri, sehingga pemerintah desa memiliki wewenang yang besar untuk melakukan pemberdayaan yang berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memajukan desanya. Pasal 1 ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa adalah sebuah upaya untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran

mereka, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan inti permasalahan dan kebutuhan utama masyarakat desa.

Gusti Bagus Arjana (2016) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai konsep yang mengintegrasikan informasi dan kreativitas, dengan ide, inovasi, serta pengetahuan manusia sebagai faktor utama dalam proses produksi. Sementara itu, menurut Sugiarto (2018) sebagaimana dikutip oleh Theresa (2023), ekonomi kreatif merupakan model ekonomi kontemporer di era informasi yang mengandalkan teknologi informasi serta menekankan peran penting pemikiran kreatif dan keahlian sumber daya manusia dalam mendorong proses produksi. Keberhasilan ekonomi kreatif sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia sebagai modal utamanya dalam mewujudkan kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat lokal, seperti di desa, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang tersedia. Kegiatan ekonomi kreatif dan UMKM memiliki peluang besar di wilayah pedesaan sebagai penggerak ekonomi yang tidak bergantung pada investasi besar dari pemerintah, namun tetap mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, sektor-sektor ini diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong perubahan struktural.

Dalam konteks ekonomi kreatif pemberdayaan perempuan merupakan keharusan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan individu perempuan,

dan juga dapat memperkuat peran mereka sebagai pelaku ekonomi yang dapat memberikan dampak positif bagi komunitas dan ekonomi lokal secara keseluruhan. Perempuan seringkali memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif, seperti dalam bidang kerajinan tangan, kuliner, desain, dan seni, namun seringkali terhambat oleh berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, pelatihan, serta jaringan pemasaran.

Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi peran perempuan ditingkat desa belum sepenuhnya berkontribusi besar dalam perekonomian di desa. Keberadaan perempuan di desa secara keseluruhan belum terberdayakan secara optimal, sehingga kebijakan pemberdayaan perlu menyasar kelompok perempuan secara spesifik. Ketidakberdayaan perempuan dalam konteks ini adalah mereka yang belum mengetahui (mengidentifikasi) kemampuan mereka sendiri, sedangkan perempuan yang berdaya adalah mereka yang mengenali potensinya dan mampu mengembangkan potensinya untuk peningkatan taraf hidupnya. Pemberdayaan kelompok perempuan ditingkat kalurahan merupakan langkah yang strategis untuk memberikan akses pengetahuan, keterampilan, serta sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha kreatif sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya agar memiliki peran dan berpartisipasi dalam proses penguatan ekonomi lokal.

Kalurahan Wonokerto merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini memiliki kekayaan potensi sumber daya, baik dari aspek sumber daya manusia maupun alamnya. Ketertarikan peneliti memilih Kalurahan Wonokerto sebagai

lokasi penelitian didasari oleh potensi unggul di bidang pertanian dan pariwisata yang cukup menonjol. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani salak, yang menunjukkan kekuatan sektor pertanian. Sementara itu, potensi pariwisatanya tercermin melalui keberadaan Desa Wisata Pulesari.

Di Kalurahan Wonokerto, potensi ekonomi kreatif sangat terbuka, terutama dengan adanya komoditas pertanian unggulan seperti salak serta pengembangan desa wisata yang menawarkan ruang promosi dan pemasaran produk lokal seperti seperti kerajinan tangan, makanan khas, atau produk berbasis salak, yang dapat dipasarkan kepada pengunjung. Kelompok perempuan memiliki posisi strategis dalam pengembangan sektor ini, karena keterlibatan mereka tidak hanya dalam aktivitas ekonomi rumah tangga, tetapi juga dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran produk-produk kreatif berbasis kearifan lokal. Akibatnya, keterlibatan kelompok perempuan dalam memanfaatkan peluang ini belum menunjukkan pola yang konsisten atau terstruktur. Di beberapa aktivitas ekonomi di Kalurahan, keterlibatan perempuan masih bersifat informal dan belum terwadahi dalam kelembagaan usaha yang mapan yang artinya, mereka belum memiliki lembaga usaha seperti koperasi yang aktif atau badan hukum resmi, serta belum memiliki legalitas usaha yang lengkap seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sertifikat PIRT). Hal ini memunculkan kebutuhan untuk menelusuri bagaimana pola fasilitasi yang diberikan pemerintah Kalurahan sejauh ini, serta sejauh mana upaya tersebut mampu membuka akses bagi perempuan untuk berkembang dalam sektor ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Disisi lain, pengembangan ekonomi kreatif di wonokerto tidak terlepas dari berbagai tantangan. Meskipun perempuan telah dilibatkan dalam berbagai aktivitas ekonomi, kesinambungan usaha masih lemah. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM antara lain terbatasnya akses pasar, lemahnya daya tawar dalam memasarkan produk, serta minimnya inovasi baik dari sisi kualitas produk maupun pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran. Selain itu, pendampingan dari pemerintah belum berjalan secara konsisten, minimnya strategi terpadu dari pihak Kalurahan yang secara spesifik menyasar pemberdayaan perempuan dalam ekonomi kreatif, serta keterbatasan memiliki kepercayaan diri maupun akses pengetahuan yang memadai untuk mengelola usaha ekonomi secara mandiri, sehingga pelaku usaha kurang mendapatkan arahan strategis untuk mengembangkan potensi usahanya secara berkelanjutan.

Selanjutnya, partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi di Kalurahan Wonokerto juga masih terbatas. Peran perempuan untuk dapat memperoleh kedaulatan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya melalui penguatan kapasitas, peningkatan skill set dan kreativitasnya belum sepenuhnya optimal. Kedudukan kelompok perempuan di Kalurahan Wonokerto cukup rentan dan mendapat predikat sebagai kelompok miskin oleh karena peran dan partisipasinya dalam sektor publik di desa ataupun dalam aktivitas ekonomi di desa masih terbatas. Artinya, Partisipasi perempuan di Kalurahan Wonokerto masih terbatas karena mereka jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan desa dan belum memiliki peran strategis dalam kelembagaan publik. Dalam aktivitas ekonomi, keterlibatan mereka juga bersifat informal dan belum

terorganisir secara kelembagaan, sehingga sulit mengakses pelatihan, permodalan, dan pasar secara berkelanjutan.

Dalam kondisi demikian, kehadiran fasilitasi dari pemerintah kalurahan menjadi sangat penting. Fasilitasi tidak sekadar menyediakan pelatihan teknis, tetapi juga mencakup perencanaan program yang sistematis, penguatan kapasitas, pendampingan berkelanjutan, hingga penciptaan ekosistem usaha yang mendukung pemberdayaan perempuan secara substantif. Penelitian ini akan menelaah berbagai permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dalam ekonomi kreatif dengan menggunakan pendekatan *governing* sebagai alat analisis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami sejauh mana proses fasilitasi, partisipasi, serta peran pemerintah kalurahan dalam memberdayakan kelompok perempuan di Kalurahan Wonokerto. Berdasarkan relevansi tersebut, peneliti mengangkat judul “Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Perempuan” sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan membatasi dan mempertegas dari fokus penelitian serta objek yang diteliti atau untuk menjawab rumusan masalah maka fokus penelitian bagaimana Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Perempuan terdiri dari;

1. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan melalui Dukungan Anggaran

2. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Melalui Program dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
3. Dinamika dan Tantangan Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Ekonomi Kreatif.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana fasilitasi pemerintah desa dalam penguatan ekonomi kreatif melalui kelompok perempuan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam penguatan ekonomi kreatif melalui Kelompok Perempuan.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1) Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan fasilitasi pemerintah desa/kalurahan dalam pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis kelompok perempuan..

#### **2) Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah kalurahan sebagai bahan pertimbangan dalam

merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mendukung penguatan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan kelompok perempuan.

## F. Literatur Review

Dalam penelitian ini peneliti akan menggali informasi dari penelitian penelitian sebelumnya baik berupa jurnal dan hasil riset lainnya sebagai bahan perbandingan dan rujukan yang berkaitan dengan penelitian peneliti dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

Penelitian oleh Yafi, Ika Chandra, dan Yahya, Pandu (2024), yang diterbitkan dalam *Jurnal Public Policy and Administration Research* Volume 2, Nomor 4, berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Kreatif Batik Tulis Giriloyo*", bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis batik tulis di Giriloyo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, sedangkan analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa pemberdayaan berlangsung secara efektif dan memberikan dampak positif. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis, serta pendampingan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Respons positif dari masyarakat dalam setiap tahap menjadi faktor pendukung keberhasilan program, yang tercermin dari meningkatnya keterampilan, pengetahuan, akses terhadap peluang, serta kondisi ekonomi warga. Proses

pemberdayaan ini mencakup penyalaman, pembentukan perilaku, pengembangan kemampuan, serta penguatan keterampilan dan aksesibilitas.

Penelitian kedua dilakukan oleh Iyan Setiawan dan tim (2024), yang dipublikasikan dalam *Jurnal Pengabdian Nasional* (JPN) Indonesia Volume 6, Nomor 1. Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan program pemberdayaan bagi perempuan tani di Desa Cipedes melalui inovasi dalam pengolahan makanan tradisional, yaitu sagon, guna meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Metode yang diterapkan mencakup pelatihan, pendampingan, serta evaluasi terhadap Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam proses produksi dan pemasaran sagon dengan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif. Hasil studi menunjukkan bahwa modifikasi pada rasa, bentuk, dan kemasan produk berhasil meningkatkan minat pasar terhadap sagon. Selain itu, pelatihan penggunaan teknologi digital untuk keperluan pemasaran juga turut memperluas wawasan dan kemampuan kewirausahaan para anggota KWT. Program ini tidak hanya berdampak positif pada peningkatan penghasilan keluarga, tetapi juga memperkuat peran perempuan tani dalam mendorong ekonomi lokal. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan melalui inovasi produk tradisional seperti sagon berpotensi besar untuk diterapkan lebih luas sebagai strategi pengembangan ekonomi di pedesaan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Febyan dan tim (2024) dan dipublikasikan dalam Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu, Volume 6, Nomor 2, melalui artikel berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di Kampung Batik Tin, Kelurahan Gundih, Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menelaah kontribusi program pemberdayaan masyarakat terhadap keberlangsungan ekonomi serta pelestarian budaya lokal. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam bersama tokoh masyarakat dan pengrajin batik, serta analisis dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas ekonomi, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat mampu mendorong kemandirian ekonomi warga, memperkuat identitas budaya, dan memperluas peluang pasar. Namun demikian, tantangan tetap ada, khususnya terkait keterbatasan akses pasar dan kurangnya dukungan pendanaan jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama lintas sektor guna menjamin kesinambungan program dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Penelitian keempat dilakukan oleh Faila Sufa Marham, dkk (2024) dan dipublikasikan dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 3, Nomor 1, pada halaman 2 hingga 13. Artikel ini berjudul Implementasi Kesetaraan Gender dan Pemanfaatan Teknologi (Aplikasi Lapor) bagi Digital Society di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Banyuasin III, Kelurahan Pangkalan Balai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan kesetaraan gender di wilayah tersebut, yang diangkat berdasarkan observasi lapangan dan dianggap relevan karena isu ini sedang menjadi perbincangan luas di berbagai media. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta analisis

data menggunakan teknik taksonomi. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kesetaraan gender masih belum maksimal. Beberapa faktor penyebabnya meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya peran pemerintah dalam menangani persoalan kesetaraan gender.

Penelitian kelima dilakukan oleh Eva Rachmawati, dkk (2024), yang dipublikasikan dalam Jurnal Bang Dimas: Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, Volume 3, Nomor 1, halaman 34–42, melalui artikel berjudul Peningkatan Kesejahteraan Perempuan. Fokus utama penelitian ini adalah pelaksanaan program Gubuk Karya di Kalurahan Bram Itam Kiri, yang dirancang untuk memberdayakan perempuan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, serta mendorong kemandirian dalam mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Metode yang digunakan mencakup identifikasi masalah melalui pengumpulan data primer dan sekunder serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasilnya menunjukkan peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi perempuan melalui berbagai kegiatan, seperti produksi barang, pelaksanaan lokakarya, serta penyelenggaraan pasar perempuan. Program ini terbukti efektif dalam mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan perempuan. Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutannya, diperlukan dukungan lebih kuat dari pemerintah dan mitra lokal, khususnya dalam hal pendanaan dan penyediaan sarana prasarana.

Penelitian keenam dilakukan oleh Haryani (2022), diterbitkan dalam Jurnal Sosial *Politico* Volume 4, Nomor 1, halaman 36–48, dengan judul Peran Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandahut, Kecamatan Pandahut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran pemerintah desa dalam membina kegiatan usaha masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan pemahaman yang faktual dan analitis mengenai proses pemberdayaan berdasarkan empat indikator utama: pembinaan sumber daya manusia, pembinaan usaha, pengelolaan lingkungan, dan penguatan kelembagaan. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat dua kelompok faktor yang memengaruhi peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat: Faktor pendukung: partisipasi aktif masyarakat, kesadaran sosial, dan tingkat pendidikan yang memadai; Faktor penghambat: keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat yang belum terbuka, serta peraturan yang bersifat membatasi.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Hanifah Tisha Ramadhani dan Marita Ahdiya (2023), dipublikasikan dalam *Joppar: Journal of Public Policy and Administration Research* Volume 1, Nomor 3, dengan judul Implementasi Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program PRIMA di Kalurahan Sumberagung serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul selama proses pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Desa PRIMA belum berjalan secara maksimal dan belum sepenuhnya mewujudkan sasaran kebijakan yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat. Kendati demikian, program ini telah memberikan akses permodalan yang berkontribusi terhadap peningkatan kondisi ekonomi perempuan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kesulitan dalam pemasaran produk, serta kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pemasaran.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Junaidi dan Pramushita Arum Pynanjung (2023), dipublikasikan dalam Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3, Nomor 1, halaman 179–192, dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan melalui UKM di Kota Singkawang. Studi ini memanfaatkan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan melalui dokumentasi dan wawancara, serta dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsinya sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam mendukung pemberdayaan perempuan melalui program UKM. Namun, efektivitas pelaksanaannya dinilai belum maksimal. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan peran tersebut, di antaranya dengan memperkuat koordinasi lintas dinas secara sinergis antara instansi teknis dan Bappeda sebagai perencana makro, serta menjalin kemitraan yang lebih aktif dengan sektor swasta.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Gesty Ernestiva (2024) yang diterbitkan dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, halaman 146–156, dengan judul Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Keterampilan Teknologi (Karang Taruna Wanita di Kabupaten Banyumas). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi pemberdayaan perempuan melalui program Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Banyumas, dengan fokus pada Karang Taruna Wanita (KTW). Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara, dan survei, ditemukan bahwa meskipun anggota KTW menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan serta teknologi, mereka memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterlibatan dalam sektor ekonomi. Penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan kewirausahaan dan teknologi yang terfokus, keterlibatan aktif perempuan dalam perancangan dan pelaksanaan program, serta dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk menjamin keberlanjutan hasil pemberdayaan.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Komang Redy Winata dan rekan-rekan (2024), diterbitkan dalam Jurnal Widya Laksami, Volume 5, Nomor 1, dengan judul Pengembangan Kapasitas Perempuan melalui Teknologi Informasi dan Pelatihan Keterampilan untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Sosial pada Serikat PEKKA di Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada pemberdayaan anggota PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) di wilayah Gianyar, Bali. Tujuannya adalah mengidentifikasi serta mengatasi tiga permasalahan utama yang dihadapi

oleh anggota PEKKA, yaitu rendahnya pemahaman terkait hukum, keterbatasan akses terhadap layanan dan informasi, serta minimnya keterampilan ekonomi. Pendekatan yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan analisis data kualitatif. Program intervensi yang dijalankan mencakup edukasi advokasi hukum, pengembangan platform digital untuk pelatihan berbasis modul, serta pelatihan kewirausahaan digital. Seluruh program dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek literasi hukum, akses informasi, serta kapasitas ekonomi anggota PEKKA. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan model pemberdayaan yang dapat direplikasi untuk perempuan kepala keluarga di konteks serupa.

Beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas merupakan penelitian terdahulu pandangan-pandangan yang sejalan dengan argumen penelitian ini, yang mendukung akan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai strategi pembangunan yang berkelanjutan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik mengulas secara mendalam peran fasilitasi pemerintah desa dalam mendorong pemberdayaan perempuan, khususnya dalam penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis lokal. Oleh karena itu dalam penelitian ini saya mengambil *Standing Posision* berusaha untuk menggali lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi yang tepat dari pemerintah kalurahan sebagai aktor utama yang berperan dalam menciptakan intervensi yang strategis dan terencana, guna memperkuat partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk fasilitasi yang sudah berjalan, tetapi juga

menggali bagaimana intervensi fasilitatif tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan di Kalurahan, memperhatikan ketersediaan sumber daya, serta mampu mendorong kemandirian kelompok perempuan secara berkelanjutan dalam penguatan ekonomi kreatif di Kalurahan Wonokerto. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoritik maupun praktis dalam memperkaya wacana pemberdayaan perempuan berbasis desa.

## **G. Kerangka Konseptual**

Pemerintah kalurahan sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan ini menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kelompok perempuan dalam mengembangkan potensi mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam memperkuat ekonomi kreatif melalui pemberdayaan kelompok perempuan. Pada kerangka konseptual ini memberi jawaban yang secara teoritis dengan melakukan penelitian dilapangan. Untuk melakukan sebuah tinjauan pustaka terhadap penguatan ekonomi kreatif melalui kelompok perempuan dan fasilitasi pemerintah dengan menggunakan konsep Governing (memusatkan perhatian pada perbuatan pemerintah).

### **1. Pemerintah Desa**

Menurut Eko (2021), pemerintah merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan, seperti halnya dalam suatu negara. Pemerintah tidak seharusnya dipahami secara sempit hanya sebagai pemimpin, penguasa, birokrasi, negara, atau sektor publik. Lebih dari itu, pemerintah adalah institusi yang mewakili kedaulatan rakyat bersama

lembaga legislatif (parlemen). Dalam konteks memahami pemerintahan desa, penting untuk mengarahkan perhatian pada pemahaman tentang konsep memerintah itu sendiri secara lebih menyeluruh.

Konsep pemerintah merujuk pada subjek yang menjalankan atau melaksanakan fungsi pemerintahan. Jika ditelaah lebih dalam, pemerintah mencakup subjek yang memiliki otoritas untuk memberikan arahan dan mengelola jalannya pemerintahan. Subjek ini dapat berupa individu seperti kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, hingga presiden maupun lembaga, seperti pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat Republik Indonesia. Dalam pengertian sempit, istilah pemerintah hanya mengacu pada cabang eksekutif. Namun, dalam arti luas, pemerintah mencakup unsur eksekutif dan legislatif. Lebih lanjut, konsep pemerintah juga menyangkut siapa dan apa yang diperintah, yakni objek dari pemerintahan. Pertanyaan apa yang diperintah menunjuk pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara luas, sehingga pemerintah tidak hanya terbatas pada urusan birokrasi atau administrasi perkantoran, tetapi juga mencakup aspek substansial dari kesejahteraan publik.

Menurut Heryanto (2016), pemerintah desa berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam mendorong kemajuan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa harus memiliki kemampuan untuk memetakan dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada di wilayahnya, serta merancang strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, Hadi (2018) menyatakan bahwa

pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dengan kata lain, pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan dari pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa—atau sebutan lainnya yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk menjabat selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa didampingi oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Lebih jauh, Pemerintah Desa juga dipahami sebagai suatu institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan serta mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai entitas pemerintahan yang berada di garis depan dan bersinggungan langsung dengan warga, Pemerintah Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas desa menjadi penting guna mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata. Dari beberapa uraian di atas, maka pemerintah desa dapat dipahami sebagai aktor dan lembaga yang memiliki legitimasi yang bertanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya proses pemerintahan di tingkat desa, agar

kepentingan masyarakat yang diperintahnya dapat terpenuhi. Adapun secara umum pemerintah desa berhak untuk memanajemen sumber daya yang dimilikinya dengan efektif dan efisien dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

## 2. Ekonomi Kreatif

Konsep ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Howkins dalam bukunya *Creative Economy: How People Make Money from Ideas* pada tahun 2001. Menurut Howkins, sebagaimana dikutip dalam Sukmadi dan diteruskan oleh Nasrudin Ali, ekonomi kreatif mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang menjadikan kreativitas meliputi kekayaan intelektual, warisan budaya, dan lingkungan sebagai pilar utama untuk pembangunan masa depan. Secara lebih luas, ekonomi kreatif dipahami sebagai sektor ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, keterampilan individu, serta potensi manusia dalam menciptakan produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi. Ekonomi kreatif juga merupakan suatu pendekatan konseptual untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pada inovasi dan daya cipta.

Sebagaimana dikutip oleh UNESCO dalam Saputra (2022), inti utama dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu sektor yang mengandalkan riset dan pengembangan sebagai dasar dari proses kreatif. Kekuatan industri kreatif terletak pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa yang bernilai komersial melalui inovasi dan eksplorasi berkelanjutan. UNESCO mendefinisikan industri kreatif sebagai sektor yang

menggabungkan proses penciptaan, produksi, dan komersialisasi atas aset tidak berwujud maupun konten budaya yang lahir secara organik. Industri ini bertumpu pada kreativitas, keterampilan, dan bakat, serta memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Dari uraian di atas, ekonomi kreatif dapat dipahami sebagai sektor ekonomi yang memanfaatkan kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan produk dan layanan yang memiliki nilai tambah, serta dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Adapun ekonomi kreatif tumbuh dan sumber produksinya dari orang-orang kreatif yang memaksimalkan pengetahuan yang dimilikinya dalam melakukan produksi. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas

### **3. Pemberdayaan Perempuan**

Secara Etimologis istilah pemberdayaan berasal dari kata dasar *daya* yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dalam terjemahan bahasa Inggris konsep ini setara dengan kata *empowerment*, yang berasal dari kata *empower* yang berarti memberi kekuasaan, menguatkan, atau memberi kemampuan. Menurut Sumodiningrat (dalam Nurahmat Putri Laksmi), pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang lemah agar mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, ketidakberdayaan, dan keterbelakangan. Konsep ini relevan untuk pemberdayaan perempuan, karena sasaran akhirnya adalah

tercapainya kemandirian, kemampuan mengambil keputusan, dan peningkatan kesejahteraan.

Menurut Prijono & Pranarka (1996), pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, memperbesar akses terhadap kekuasaan dan pengawasan dalam pengambilan keputusan, serta menumbuhkan tindakan-tindakan transformasi sosial agar tercipta kesetaraan yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, proses ini bukan hanya menempatkan perempuan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang mampu bertindak, menentukan pilihan, dan mempengaruhi perubahan di lingkungannya.

Secara keseluruhan, pemberdayaan merupakan proses penguatan kemampuan dan kapasitas individu atau kelompok agar mampu berpartisipasi, mengambil keputusan, dan melakukan transformasi sosial. Dalam konteks perempuan, pemberdayaan bertujuan menjadikan perempuan sebagai subjek yang mandiri, berdaya, dan berperan aktif dalam mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan.

#### **4. Fasilitasi**

Menurut Soepomo (2009), sebagaimana dikutip dalam berbagai kajian pembangunan, fasilitasi merupakan salah satu peran kunci yang dijalankan oleh pendamping dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Istilah fasilitasi banyak digunakan oleh praktisi dan aktivis pembangunan untuk

menggambarkan bentuk intervensi atau dukungan yang bertujuan memperkuat kapasitas individu, kelompok, maupun kelembagaan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, fasilitasi tidak hanya dimaknai sebagai bantuan semata, tetapi lebih sebagai pola pendampingan dan dukungan yang memungkinkan masyarakat menggerakkan potensi dan sumber dayanya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tujuan utama dari fasilitasi adalah memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Secara praktis, proses fasilitasi dapat diwujudkan melalui pengadaan personil seperti tenaga pendamping, relawan, atau pihak lain yang bertugas memberikan penyuluhan, edukasi publik, bimbingan, hingga dukungan psikologis. Intervensi ini bertujuan untuk membawa masyarakat dari ketidaktahuan menuju kesadaran, serta mendorong terjadinya transformasi sosial yang berkelanjutan.

Menurut Mochran (2014), fasilitasi merupakan suatu proses yang membantu peserta dalam belajar melalui cara-cara yang paling efektif. Proses ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk membimbing individu maupun kelompok agar dapat mencapai atau meningkatkan pemahaman mereka terhadap suatu topik tertentu. Secara etimologis, kata fasilitasi berasal dari bahasa Latin *faciles* dan *facilis*, yang berarti “kemudahan” atau “membuat sesuatu menjadi mudah”. Dalam bahasa Inggris, *to facilitate* berarti mempermudah. Panggabean (1999) menambahkan bahwa istilah fasilitasi dan fasilitator memiliki makna yang

luas. Kata fasilitasi berasal dari bahasa Prancis *facilis*, yang juga berarti “memudahkan”, sehingga seorang fasilitator dapat dimaknai sebagai pihak yang berperan dalam mempermudah terjadinya suatu proses. Dengan demikian, secara sederhana, fasilitasi dapat dipahami sebagai suatu proses untuk memudahkan, membantu, atau mendukung terjadinya sesuatu, seperti proses komunikasi, pembelajaran, atau aktivitas lainnya.

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan fasilitasi merupakan sebuah rangkaian proses, dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi pemerintah untuk memudahkan, membantu atau mendukung individu/organisasi mencapai tujuan melalui komunikasi, kolaborasi, pembelajaran dan pengembangan.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam suatu kajian ilmiah. Menurut Sugiyono (2020:1), metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan ilmiah sendiri merujuk pada metode atau proses yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan fakta dan bukti empiris, yang dapat diverifikasi dan direplikasi oleh pihak lain.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Bogdan dan Taylor (2022:22), sebagaimana dikutip oleh Idris,

H.T. (2023), menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dalam konteks alaminya, dengan cara mendeskripsikannya secara naratif menggunakan bahasa dan kata-kata. Moleong (2006:6) menegaskan bahwa pendekatan ini berfokus pada penggambaran pengalaman secara mendalam dalam konteks yang spesifik.

Menurut Creswell (2014), sebagaimana dikutip oleh Dendo (2023), penelitian kualitatif eksploratif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini lazim digunakan pada tahap awal penelitian untuk memperjelas permasalahan yang ada dan menentukan arah penelitian lanjutan yang lebih tepat. Selaras dengan itu, Bungin (2013:28) sebagaimana dikutip oleh Lede (2023), menyatakan bahwa penelitian eksploratif merupakan studi terhadap permasalahan yang belum pernah diteliti sebelumnya. Dalam konteks ini, meskipun peneliti mengalami kejemuhan data, penelitian eksploratif tetap berusaha menggali dan menemukan inti persoalan dari objek kajian yang diteliti.

Dari uraian di atas tentang penelitian kualitatif eksploratif, maka peneliti memiliki pandangan bahwasannya penelitian kualitatif eksploratif adalah suatu penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam terkait suatu

fenomena yang akan diteliti. Dalam konteks ini, sehingga peneliti berupaya menggali lebih dalam dan mencari pemahaman baru terkait fenomena yang belum banyak dieksplorasi yang trerkait dengan fasilitasi pemerintah kalurahan dalam penguatan ekonomi kreatif melalui kelompok perempuan di kalurahan Wonokerto baik itu yang berupa program, kejadian, perbuatan, aktivitas yang telah diselenggarakan terhadap kelompok perempuan dan melakukan pengumpulan data secara sistematis yang berdasarkan pada prosedur pengumpulan data yang berkelanjutan dan berkala.

## **2. Objek Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, yang merupakan objek penelitian adalah Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Penguatan Ekonomi Kreatif Melalui Kelompok Perempuan. Sehingga obyek penelitiannya adalah lokasi penelitian peneliti di Kalurahan Wonokerto.

## **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan setiap entitas yang dijadikan sumber informasi dan sumber data oleh peneliti, dimana setiap entitas tersebut berkaitan langsung dengan objek penelitian, baik itu individu ataupu institusi terkait. Menurut Arikunto (2006:145) sebagaimana dikutip oleh Idris, H.T. (2003), subjek penelitian adalah individu atau pihak tertentu yang menjadi sasaran pengumpulan data oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dapat sangat bervariasi tergantung pada tujuan, konteks sosial, dan fenomena yang menjadi fokus kajian. Dengan demikian, subjek dalam penelitian ini terdiri dari unsur-unsur pemerintahan desa serta

masyarakat desa. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa individu yang dipilih memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan isu yang diteliti.

Teknik purposive adalah metode penentuan informan yang jumlahnya tidak ditetapkan di awal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang relevan terhadap fokus penelitian. Proses pemilihan informan berlangsung hingga data yang diperoleh dianggap telah mencukupi untuk keperluan analisis dan pembahasan. Jika informasi yang terkumpul telah memenuhi kebutuhan penelitian, maka penambahan informan tidak dilakukan lagi, dan proses pengumpulan data dinyatakan selesai. Sebaliknya, bila informasi yang diperoleh dari sejumlah informan belum memenuhi kebutuhan yang diinginkan, jumlah informan ditambah lagi sampai kebutuhan data analisis dan pembahasan terpenuhi (Moleong, 2014). Adapun subjek penelitian (informan) dalam penelitian ini di sajikan dalam tabel berikut;

**Tabel 1. 1**  
**Deskripsi Informan**

No	Nama Informan	Kapasitas Informan
1	Riyanto Sulistiyo Budi, S.E	Lurah
2	Sumijo, S.Sos	Carik
3	Sutarjo	BPKal
4	Agus Hardono, A.Md	Staf Kamituo
5	Suyati	PKK
6	Kuswindarti	Anggota UMKM
7	Siti Mubaroka	Desa Prima
8	Erwanti	Anggota Pokdarwis
9	Ismiyati	Masyarakat

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Observasi merupakan cara mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Bungin, 2007: 115). Salim dan Syahrum (2012:114) sebagaimana dikutip oleh Riska Angelin (2022), menjelaskan bahwa pengumpulan data dengan menggunakan observasi ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari setting tertentu. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena dilapangan agar mendapat data yang akurat di lokasi penelitian.

Peneliti melakukan observasi dalam empat kali kesempatan yakni dengan tujuan mengamati secara umum terhadap kondisi lingkungan, keberadaan fasilitas pendukung, serta aktivitas usaha yang telah berjalan, guna memperoleh gambaran kontekstual yang mendukung data hasil wawancara dan dokumentasi. Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam proses pelaksanaanya peneliti tidak dapat mengobservasi bagaimana aspek perencanaan program, pelaksanaan pelatihan, pendampingan kegiatan usaha, dikarenakan pemerintah tidak sedang menjalankan program/kegiatan tersebut.

### **b. Wawancara**

Esterberg (dalam Sugiyono, 2020:304) sebagaimana dikutip oleh Riska Angelina (2022), mendefinisikan wawancara sebagai proses interaksi antara dua individu untuk saling bertukar informasi dan

gagasan melalui sesi tanya jawab, dengan tujuan membangun pemahaman atas suatu topik tertentu. Wawancara merupakan bentuk percakapan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Proses ini dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur (Moleong, 2014:86). Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang mendalam dan kompleks. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun pedoman wawancara berdasarkan ruang lingkup fokus kajian. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, dan jawaban yang diberikan oleh informan dicatat sebagai data. Informan tersebut merupakan bagian dari subjek utama dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada kesembilan informan yang dipilih secara purposive, yakni informan yang dianggap relevan dan memiliki pengetahuan yang memadai terkait fasilitasi pemerintah kalurahan dalam penguatan ekonomi kreatif melalui kelompok perempuan. Proses wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, sehingga memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam dan kontekstual sesuai dengan dinamika di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, peneliti menghadapi beberapa kendala, seperti kesulitan mengatur waktu wawancara karena kesibukan

informan, adanya keterbatasan keterbukaan informan dalam menyampaikan permasalahan secara detail, serta perbedaan persepsi antar informan mengenai program yang dijalankan.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen tertulis, arsip, catatan lapangan, serta berbagai bahan terekam lainnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam studi ini, peneliti memilih dokumen yang relevan dan melakukan evaluasi terhadap keabsahan serta kegunaannya untuk mendukung jalannya proses penelitian. Dokumentasi juga digunakan sebagai alat verifikasi atau validasi terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Moleong (2014:160), dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, kaya akan informasi, bersifat alami, dan sesuai dengan konteks nyata dari fenomena yang dikaji.

Untuk menganalisis beberapa fokus penelitian yang peneliti ajukan maka dibutuhkan serangkaian dokumentasi pendukung yang memiliki kaitan langsung dengan pokok pembahasannya. Adapun dokumentasi yang dikumpulkan meliputi data administratif RPJKal Wonokerto dan Laporan PKK 2024. Peneliti menghadapi beberapa kendala, di antaranya keterbatasan ketersediaan data tertulis yang terdokumentasi secara sistematis, sulit mendapatkan dokumen dari organisa desa Prima sama Pokdarwis.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data digunakan untuk menggali informasi yang terkandung dalam data yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan membuat keputusan yang berbasis pada fakta atau bukti. Proses ini merupakan kelanjutan dari pengolahan data yang akan membahas terkait data dan latar belakang untuk menemukan persamaan atau perbedaan yang menghasilkan kesimpulan. Dalam prosesnya peneliti akan mengelompokan data yang dikumpulkan dalam rangka mencari benang merah atau temuan yang berguna dalam menjawab permasalahan utama yang diajukan dalam penelitian. Adapun dalam penelitian kualitatif teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan melalui verifikasi data.

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses dalam analisis data yang bertujuan untuk mempertajam, mengelompokkan, memusatkan perhatian, menyaring, dan menyusun data secara teratur guna mempermudah proses analisis serta mendukung penarikan kesimpulan. Data yang tidak relevan akan dieliminasi, sedangkan data yang masih berkaitan langsung dengan fokus penelitian akan disajikan secara sistematis. Proses ini dilakukan terhadap data yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **b. Display Data**

Penyajian data adalah proses menyusun dan menampilkan data yang telah melalui tahap reduksi ke dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, diagram, maupun uraian naratif. Tahapan ini berperan penting dalam mempermudah analisis lebih lanjut serta membantu peneliti dalam menarik kesimpulan yang tepat dari hasil penelitian. Data yang ditampilkan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu, seperti urutan kronologis, konsep, kategori, atau pola-pola temuan yang muncul dari lapangan.

### c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Verifikasi data dilakukan dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan pertanyaan penelitian, akurat, dan valid. Verifikasi data juga melibatkan pengecekan konsistensi antara temuan dengan data, serta mempertimbangkan faktor konteks yang dapat mempengaruhi interpretasi data. Sehingga dalam penarikan kesimpulan peneliti dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan peneliti mampu menyajikan temuan baru atas hasil penelitiannya.

## **BAB II**

### **PENGUATAN EKONOMI KREATIF MELALUI KELOMPOK PEREMPUAN DI KALURAHAN WONOKERTO**

Wonokerto adalah salah satu Kalurahan di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya Kalurahan Wonokerto merupakan wilayah yang terdiri dari 4 (empat) kalurahan yakni, Kalurahan Tunggul, Kalurahan Ledoklempong, Kalurahan Garongan, dan Kalurahan Dadapan. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintah Kalurahan, maka Kalurahan-Kalurahan tersebut digabung menjadi satu Desa otonom dengan nama Desa Wonokerto. Wonokerto kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan.

#### **A. Ekonomi Kreatif di Kalurahan Wonokerto**

Kalurahan Wonokerto yang terletak di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, dikenal sebagai sentra salak pondoh dan menjadikan komoditas ini sebagai basis utama perekonomian masyarakat. Aktivitas ekonomi kreatif berkembang pesat melalui budidaya salak pondoh, pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah seperti dodol salak, keripik salak, manisan, sirup, hingga kopi biji salak, serta pemanfaatan limbah batang dan pelepasan salak untuk kerajinan tangan dan suvenir.

Selain itu, konsep agrowisata berbasis salak juga dikembangkan

sehingga wisatawan dapat memetik salak langsung dari kebun, belajar mengolah hasil, sekaligus menikmati kuliner berbahan salak. Berbagai bentuk usaha ini dikelola oleh kelompok masyarakat, terutama perempuan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UMKM desa. Penelitian Wardani (2024) menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan hasil pertanian di Kalurahan Wonokerto meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun kelompok.

Hal ini sejalan dengan temuan Dispar Sleman (2022) yang menegaskan bahwa desa wisata salak pondoh Turi menjadi ikon ekonomi kreatif yang mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing lokal, serta Siska Dewi dkk. (2023) yang mengungkapkan bahwa inovasi produk berbasis salak dan pendampingan digital marketing memperluas akses pasar dan memperkuat UMKM desa. Keberhasilan ekonomi kreatif ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga berperan penting dalam pemberdayaan perempuan karena memberi ruang bagi mereka untuk terlibat aktif dalam produksi, pengemasan, pemasaran, dan pengambilan keputusan ekonomi, sehingga perempuan desa tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek yang berdaya dalam menentukan arah kehidupannya dan lingkungan sekitarnya. Berikut ini pengelompokan ekonomi kreatif di Kalurahan Wonokerto:

### 1) Bidang Pertanian dan Argowisata

Bidang pertanian menjadi fondasi utama perekonomian masyarakat

Kalurahan Wonokerto, khususnya melalui budidaya salak pondoh. Komoditas salak ini menjadi identitas desa sekaligus sumber penghasilan utama bagi sebagian besar warga. Aktivitas pertanian dilakukan secara turun-temurun, dengan teknik perawatan tanaman yang terus ditingkatkan agar kualitas buah tetap terjaga. Selain menjual hasil panen dalam bentuk segar, masyarakat juga melakukan pengelolaan kebun secara berkelompok, sehingga hasil yang diperoleh lebih merata dan stabil.

Selain kegiatan budidaya, masyarakat Wonokerto mengembangkan konsep agrowisata berbasis salak yang menggabungkan sektor pertanian dengan pariwisata. Wisata petik salak menjadi daya tarik utama, di mana pengunjung dapat memetik salak langsung di kebun dan belajar cara menanam serta merawat tanaman. Program edukasi ini juga memperkenalkan proses pengolahan hasil kebun, sehingga selain memberikan nilai ekonomi tambahan melalui sektor pariwisata, kegiatan ini turut meningkatkan wawasan pengunjung dan memperkuat citra Wonokerto sebagai desa wisata edukasi.

## 2) Pengolahan Pangan dan Minuman

Di bidang pengolahan pangan, kreativitas masyarakat Wonokerto berkembang dengan memanfaatkan hasil panen salak menjadi produk bernilai tambah. Produk olahan yang dihasilkan antara lain dodol salak, keripik salak, manisan salak, sirup salak, hingga kopi biji salak. Proses pengolahan ini tidak hanya memperpanjang masa simpan buah, tetapi juga meningkatkan nilai jual produk dan memberikan variasi pilihan kepada

konsumen. Produk-produk tersebut mulai dipasarkan di tingkat lokal, bahkan dalam beberapa kesempatan telah merambah ke pasar regional.

Selain produk berbahan dasar salak, masyarakat juga memanfaatkan hasil kebun lain seperti singkong, pisang, dan ubi untuk diolah menjadi berbagai camilan tradisional. Kegiatan ini banyak melibatkan kelompok usaha rumah tangga, terutama ibu-ibu yang bekerja secara berkelompok dalam memproduksi, mengemas, dan memasarkan hasil olahan. Bidang ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi kreatif desa karena mampu menciptakan nilai tambah dari hasil kebun yang sebelumnya dijual mentah, sekaligus membuka peluang usaha baru.

### 3) Bidang Kerajinan dan Produk Kreatif

Bidang kerajinan di Wonokerto berkembang melalui pemanfaatan limbah dari pohon salak, seperti batang dan pelepah, yang diolah menjadi berbagai produk kerajinan. Limbah ini diubah menjadi souvenir, hiasan rumah, pot tanaman, dan benda dekoratif lainnya. Kreativitas ini tidak hanya mengurangi limbah pertanian, tetapi juga menciptakan produk bernilai jual yang diminati wisatawan dan pembeli lokal. Produk kerajinan ini biasanya dijual di pusat oleh-oleh dan bazar desa yang rutin diselenggarakan.

Selain pemanfaatan limbah salak, masyarakat juga mengembangkan keterampilan membuat anyaman dari bambu dan rotan. Produk anyaman berupa tikar, keranjang, tas, dan peralatan rumah tangga lainnya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dipasarkan sebagai produk khas desa. Kegiatan kerajinan ini menjadi sarana untuk menyalurkan

kreativitas, melestarikan kearifan lokal, dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### 4) Bidang Jasa

Bidang jasa kreatif di Wonokerto berperan dalam mendukung pengelolaan dan pemasaran hasil ekonomi kreatif. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang banyak beranggotakan perempuan memiliki peran penting dalam mengorganisasi produksi dan mengemas produk dengan standar yang lebih menarik. Melalui kerja sama ini, masyarakat dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan kualitas produk yang lebih baik. Selain itu, ada juga jasa pemasaran berbasis digital yang kini mulai dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk-produk lokal ke luar daerah.

Selain KUBE, usaha jasa lain yang berkembang di desa ini adalah usaha konveksi rumah tangga dan jasa dekorasi acara. Usaha konveksi dilakukan oleh warga yang memiliki keterampilan menjahit dan memproduksi pakaian untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Sementara itu, jasa dekorasi acara seperti pernikahan, khitanan, dan kegiatan desa memanfaatkan kreativitas masyarakat dalam seni tata ruang dan estetika. Bidang jasa kreatif ini menjadi pelengkap bagi sektor ekonomi kreatif lain karena mendorong kolaborasi, menumbuhkan inovasi, dan membuka lapangan kerja di tingkat lokal.

Dari keempat bidang ekonomi kreatif yang berkembang di Kalurahan Wonokerto, masyarakat telah memanfaatkan potensi lokal melalui budidaya salak pondoh, pengolahan produk pangan dan minuman, kerajinan berbasis

sumber daya desa, serta layanan jasa kreatif dan UMKM. Pemerintah kalurahan memiliki peran sebagai fasilitator dengan memberikan pendampingan, pelatihan, serta membuka akses promosi bagi produk lokal. Namun, upaya fasilitasi ini belum berjalan optimal karena masih terbatas pada kegiatan bersifat seremonial atau program jangka pendek, sehingga keberlanjutan dan perluasan dampaknya masih bergantung pada inisiatif swadaya masyarakat.

Pemerintah Kalurahan Wonokerto memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Dukungan ini dilakukan melalui beberapa bentuk fasilitasi agar kegiatan ekonomi kreatif yang sebelumnya berjalan secara swadaya dapat menjadi lebih terarah, terorganisir, dan memiliki daya saing. Peran tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut;

a) Fasilitas Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan

Pemerintah kalurahan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, pengolahan produk, dan manajemen usaha bagi kelompok masyarakat agar mampu menghasilkan produk olahan salak dan kerajinan yang bernilai tambah dan berkualitas.

b) Pembentukan dan pendampingan kelembagaan usaha

Pemerintah kalurahan mendorong terbentuknya kelompok usaha seperti Desa Prima dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai wadah kolaborasi, khususnya bagi perempuan, untuk mengelola usaha secara bersama-sama.

c) Promosi dan Pemasaran Produk

Melalui kegiatan desa, bazar, serta kerja sama dengan pihak luar, pemerintah kalurahan membantu mempromosikan produk-produk hasil kreativitas warga agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

d) Penghubung dengan pihak eksternal

Pemerintah kalurahan berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha kreatif dengan pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, maupun lembaga mitra lain untuk mendapatkan pendampingan, akses permodalan, dan peluang pemasaran.

e) Pendampingan berkelanjutan (masih terbatas)

Meskipun fasilitasi telah dilakukan, dukungan yang diberikan masih perlu diperkuat agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Keberlanjutan program penting dilakukan agar inisiatif ekonomi kreatif tidak hanya bertumpu pada swadaya masyarakat.

Peran-peran tersebut memberikan dampak positif dalam pengembangan potensi lokal, terutama bagi kelompok perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi kreatif. Namun, peran ini juga menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan program dan ketersediaan sumber daya, sehingga ke depan diperlukan strategi yang lebih konsisten dan kolaboratif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kalurahan Wonokerto.

Dari sisi anggaran untuk program penguatan ekonomi kreatif di Kalurahan Wonokerto menunjukkan adanya komitmen pemerintah kalurahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran desa yang

digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha kecil, hingga promosi produk-produk lokal.

Hadirnya desa Prima telah menjadi wadah bagi perempuan desa dalam mengembangkan usaha produktif. Melalui fasilitasi anggaran, lembaga ini berperan dalam mengorganisasi pelatihan, membantu pengemasan produk, serta membuka akses pasar yang lebih luas. Kehadiran Desa Prima tidak hanya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk lebih berdaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah kalurahan dalam mengelola program-program.

Sejalan dengan berbagai program dan dukungan yang telah diberikan, muncul beragam hasil produksi ekonomi kreatif di Kalurahan Wonokerto sebagai bukti nyata dari partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal. Adapun produk unggulan yang telah dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif di Kalurahan Wonokerto adalah salak, dengan diolah produk turunan menjadi dodol salak.

**Gambar 2. 1**  
**Produk kuliner Dodol Salak**

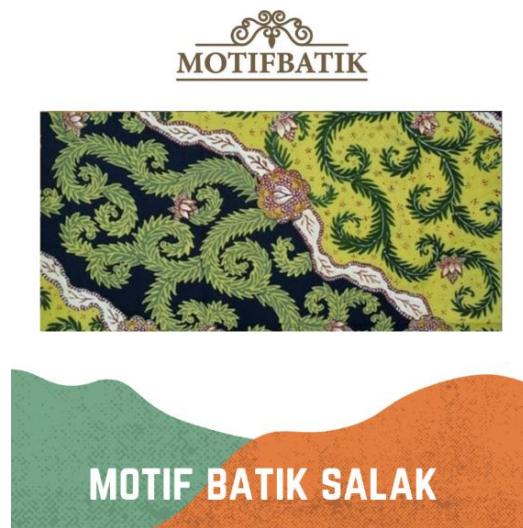


(Sumber : <https://joglonews.com/2024/11/22/olahan-salak-pondoh-berlian-kasturi-jadi-oleh-oleh-primadona-di-sleman/?>)

Produk kuliner berbahan dasar salak pondoh ini diolah menjadi dodol manis kenyal yang awet dan cocok dijadikan oleh-oleh khas Wonokerto. Dodol salak merupakan inovasi masyarakat untuk memanfaatkan hasil panen salak secara maksimal, meningkatkan nilai jual buah, dan menciptakan identitas produk lokal yang kuat. Pelaku utamanya adalah ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok usaha, terutama Desa Prima, yang mengelola mulai proses produksi hingga pemasaran.

Selain sektor kuliner yang berbasis pada hasil olahan salak, aktivitas ekonomi kreatif di Kalurahan Wonokerto juga berkembang pada bidang kerajinan. Berbagai kelompok perempuan, mulai memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk kerajinan yang bernilai ekonomis dan memiliki ciri khas budaya setempat, salah satunya batik.

**Gambar 2. 2**  
**Produk kerajinan Batik motif salak Pondoh**



(Sumber : <https://www.motifbatik.web.id/2021/06/motif-batik-khas-sleman.html>)

Meskipun Wonokerto bukanlah sentra utama untuk industri kerajinan di

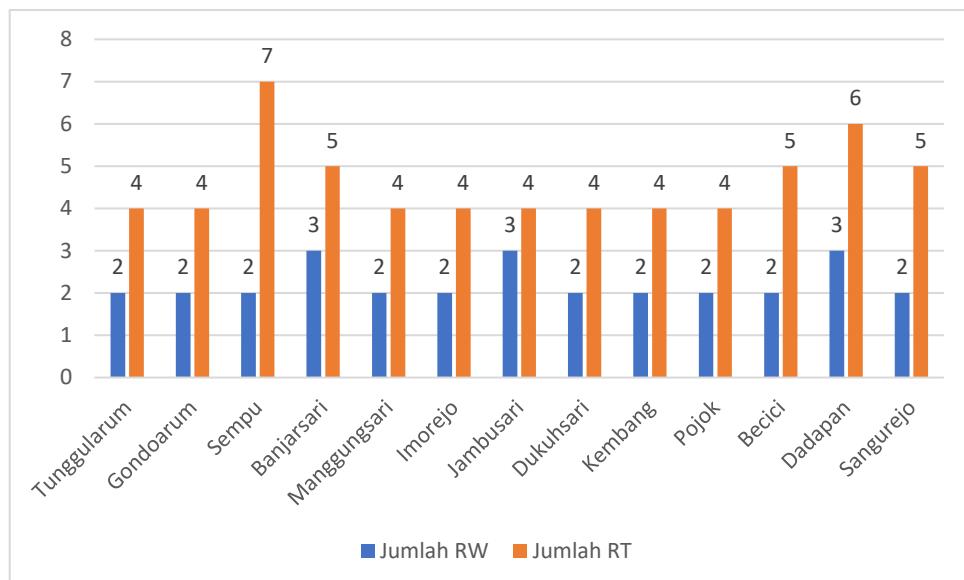
Sleman, keberadaan kelompok masyarakat yang memproduksi batik bermotif salak pondoh dan kerajinan anyaman sederhana menjadi pelengkap identitas desa wisata salak. Produk-produk kerajinan ini lebih berfungsi sebagai penunjang daya tarik wisata dan sumber tambahan penghasilan warga, sehingga perannya bersifat melengkapi potensi kuliner yang sudah lebih dulu berkembang.

## **B. Kondisi Geografis**

### **1. Batas Administrasi**

Secara administratif Kalurahan Wonokerto merupakan salah satu Kalurahan yang berada di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Wonokerto berbatasan dengan Kalurahan lain diantaranya dari sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Girikerto, Kalurahan Turi, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaliurang, Desa Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Donokerto, Kaluraha Bangukerto, Kapanewon Turi dan di sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Girikerto, Kecamatan Turi, Taman Nasional Gunung Merapi. Kalurahan Wonokerto terdiri dari 13 Padukuhan yang terdiri dari 64 RT dan 29 RW dengan rincian sebagai berikut:

**Gambar 2. 3**  
**Grafik Pembagian Wilayah Padukuhan, RW/RT Kalurahan Wonokerto**



*Sumber RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Pada hakikatnya Kalurahan Wonokerto menggambarkan potret Kalurahan secara eksisting beserta persoalannya untuk dikaji lebih mendalam dalam rangka pengembangan Kalurahan kedepan dalam jangka 6 tahun yang berfokus pada 3 sektor yaitu Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata. Luas wilayah Kalurahan Wonokerto 1.547 Ha, yang terdiri dari wilayah untuk sawah/pertanian, ladang/tegalan, perkebunan, permukiman, industri, perdagangan dan jasa, hutan rakyat dan lain-lain.

## 2. Kondisi Fisik Wilayah

Kalurahan Wonokerto memiliki luas sebesar 1.547 Ha, yang terdiri dari wilayah untuk sawah/pertanian, ladang/tegalan, perkebunan, permukiman, industri, perdagangan dan jasa, hutan rakyat dan lain-lain. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Penggunaan lahan Eksisting Kalurahan Wonokerto**

No	Nama Padukuhan	Jenis Penggunaan Lahan								Jumlah
		Sawah/Pertanian	Lahan/Tegalan	Industri	Perkebunan	Perkebunan	Perdagangan dan jasa	Hutan	Lain-lain	
1	Tunggularum	5	80	-	40	44	-	17	4	190
2	Gondoarum	10	38	-	50	10	-	-	-	108
3	Sempu	-	1,2	-	34	51,3	-	-	-	86,5
4	Banjarsari	74	13,5	-	1,9	4,9	-	-	-	94,3
5	Manggungsari	4	20,5	-	53,5	8	-	-	-	86
6	Imorejo	25,3	5,4	1	1	31,5	-	-	-	64,2
7	Jambusari	37	10	-	-	2	-	-	1	50
8	Dukuhsari	36	-	-	10	9	-	-	-	55
9	Kembang	8	-	-	45	7,5	1	-	-	61,5
10	Pojok100	5	2,7	-	14,6	21	-	-	-	43,3
11	Becici	28	4	-	-	8	-	-	-	40
12	Dadapan	3,4	2,8	0,2	31,8	25,8	2,9	-	-	66,9
13	Sangurejo	0,7	9	-	32,5	15	-	-	-	57,2
Total		236, 4	187, 1	1,2	314, 3	238	3,9	17	5	1002,9
Percentase (%)		23,5 7%	18,6 6%	0,12 %	31,3 4%	23,7 3%	0,39 %	1,70 %	0,50 %	,00%

*Sumber RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Jika mengacu pada tabel di atas maka disetiap luasan wilayah Padukuhan yang ada pada Kalurahan Wonokertop, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga memberikan pengaruh yang signifikan dalam hal sumber mata pencaharian penduduk Kalurahan. Dari tabel diatas, sumber daya pangan yang menjadi karakteristik dominan, didominasi oleh Perkebunan dengan persentase sekitar 314,3%, lalu disusul oleh wilayah pertanian sebesar 23,57% dan wilayah pemukiman sebesar 23,73%. Selanjutnya data di atas juga dapat di tarik kesimpulan bahwasannya Kalurahan Wonokerto dalam 6 tahun kedepan memiliki prospek pada 3 sektor

yaitu agribisnis, agripindustri, dan agrowisata.

### **3. Kondisi Topografi**

Kalurahan Wonokerto berada di kaki /lereng gunung merapi yang terletak di Kapanerwon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kalurahan Wonokerto terletak pada ketinggian 400 s/d 900 m dari permukaan air laut, dengan banyak curah hujan 3.908 mm/th dan suhu udara rata-rata 27°C. Dengan ketinggian tersebut, sebagian besar wilayahnya adalah pertanian.

### **C. Kondisi Demografi Kalurahan**

Data kependudukan yang disajikan bersumber dari perkembangan Desa dan Kalurahan tahun 2020. Data demografi ini penting bagi pemerintah Kalurahan untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah Angkatan kerja. Data penduduk menurut golongan umur di Kalurahan Wonokerto dapat membantu keadaan masyarakat dengan data yang tersedia. Data demografi meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk dan jumlah penduduk yang berubah setiap waktu. Jumlah penduduk Kalurahan Wonokerto pada tahun 2020 adalah 10.079 jiwa dengan rincian 5.062 jiwa laki-laki dan 5.017 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kalurahan Wonokerto adalah 3.085 KK.

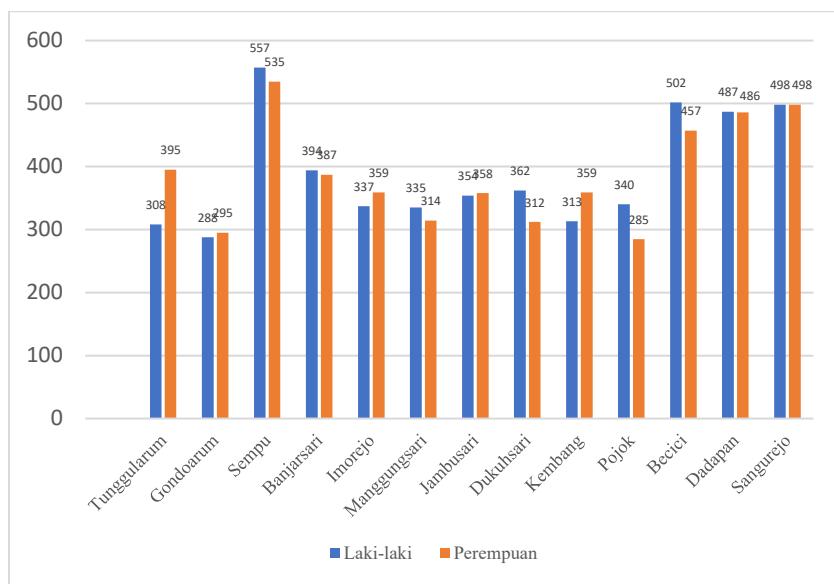
#### **1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Data kependudukan yang disajikan bersumber dari potensi Kalurahan dan hasil survei oleh masyarakat. Data-data kependudukan tersebut meliputi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk 5 tahun

terakhir, struktur umur, struktur pendidikan, dan struktur mata pencaharian.

Berikut ini tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin;

**Gambar 2. 4**  
**Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**



*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

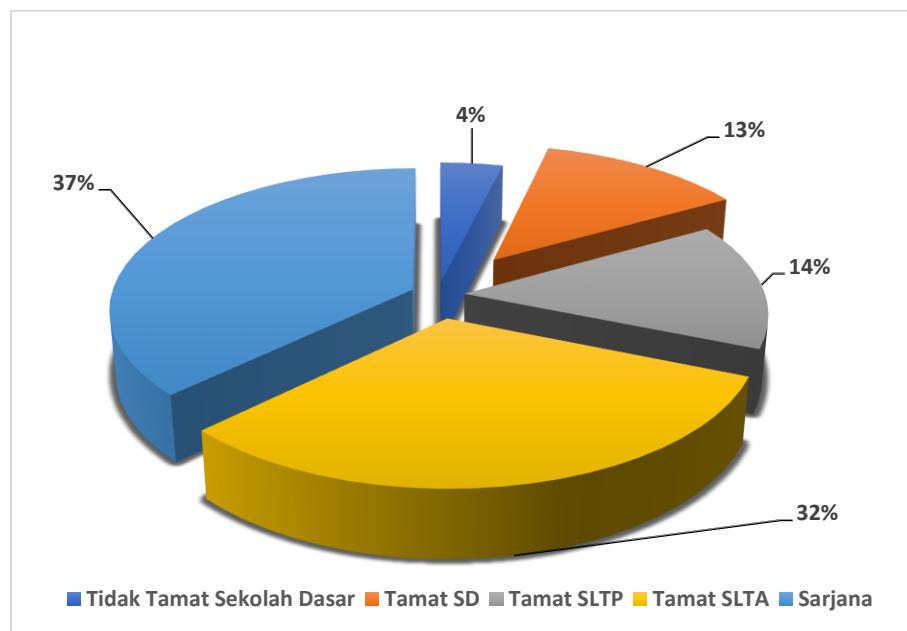
Mengacu pada data yang tertera pada grafik di atas, penduduk di Padukuhan Kalurahan Wonokerto memiliki variasi jumlah Penduduk antar laki-laki maupun Perempuan yang tidak terlalu signifikan, sehingga pembagian penduduk tersebut cukup merata. Adapun perbandingannya adalah yang paling padat adalah penduduk Laki-laki dengan jumlah 5.075 jiwa, sedangkan penduduk Perempuan berjumlah 5.050 jiwa.

## 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan saat ini menjadi hal yang sangat penting. Tingkat pendidikan memiliki dampak besar terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Aktivitas pembangunan di Kalurahan dapat berjalan dengan baik

jika masyarakat memiliki SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, tingkat pendidikan menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan. Kalurahan Wonokerto, khususnya, telah berhasil dalam meningkatkan angka melek huruf dan mengurangi buta aksara. Berikut ini adalah data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 2.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**



*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

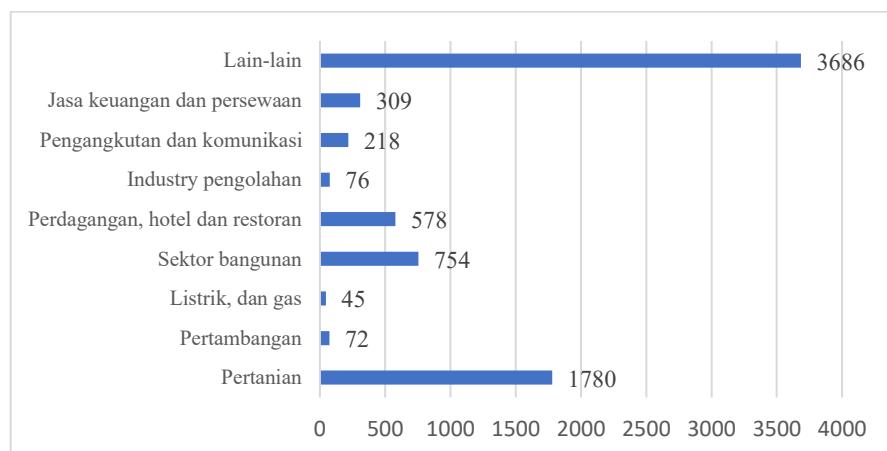
Berdasarkan data di atas, Tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Wonokerto tergolong cukup beragam, dengan mayoritas penduduk berpendidikan hingga jenjang menengah pertama dan menengah atas. Meskipun sebagian kecil telah menyelesaikan pendidikan tinggi, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara umum kapasitas sumber

daya manusia di Kalurahan ini masih berada pada tingkat sedang. Dalam konteks penguatan ekonomi kreatif, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kalurahan, karena keberhasilan fasilitasi program sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memahami, mengelola, dan mengembangkan usaha secara mandiri serta adaptif terhadap perubahan, khususnya dalam hal literasi teknologi dan pemasaran.

### 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Berikut merupakan data penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kalurahan Wonokerto;

**Gambar 2. 6**  
**Data Penduduk Menurut Pencaharian**



*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Data yang disajikan menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Kalurahan Wonokerto cukup beragam. Meskipun mayoritas masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian, terdapat potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan alternatif. Kepemilikan lahan yang dikelola langsung oleh masyarakat dapat

dikombinasikan dengan inovasi berbasis ekonomi kreatif, seperti agrowisata, kerajinan tangan, atau produk olahan hasil pertanian. Oleh karena itu, pemerintah Kalurahan perlu merumuskan kebijakan yang mendorong penguatan ekonomi kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diversifikasi ekonomi lokal.

## **D. Kondisi Sosial Ekonomi Kalurahan Wonokerto**

### **1. Kondisi Sosial**

Kondisi sosial masyarakat Kalurahan Wonokerto yang penuh kebersamaan, kegotong-royongan hingga saat ini masih terpelihara dengan baik. Nilai-nilai kekeluargaan masih dijunjung tinggi, sehingga setiap ada persoalan yang muncul selalu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan melalui musyawarah melalui mufakat. Disamping itu, hubungan kekerabatan dan keterikatan yang kuat mendorong masyarakat untuk saling bantu-membantu baik dalam hal kesusahan maupun ketika masyarakat punya hajatan seperti kenduri/kondangan yang sering dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar islam maupun peringatan-peringatan lainnya. Banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang berkembang dan berjalan aktif. Adapun organisasi-organisasi yang ada di seluruh wilayah Kalurahan Wonokerto di masing-masing padukuhan dapat dilihat di tabel berikut;

**Tabel 2. 2**  
**Organisasi Kemasyarakatan**

No	Padukuhan	Jenis Organisasi	Penanggung Jawab
1	Tunggularum	Arisan, Siskamling, PKK	Ketua RT, Kader PKK
2	Gondoarum	P3A, Karang Taruna, PKK, Posyandu Pertemuan RT	Kader PKK Ketuan
3	Sempu	Siskamling	Dukuh Ketua RW Ketua RT
4	Banjarsari	Siskampling, Karang taruna	LPMD
5	Manggungsari	Siskamling Pertemuan RT	Dukuh, RT/RW
6	Imorejo	Simpan pinjam Arisan, Siskamling, Pengajian, Merti bumi	Dukuh
7	Jambusari	Siskamling	Dukuh
8	Dukuhsari	Arisan, pengajian, Kenduri	Dukuh, Takmir
9	Kembang	Siskampling	Dukuh
10	Pojok	Siskamling,	Ketua RT, Kepala Dukuh
11	Sangurejo	Siskamling,	Ketua RT dan dukuh
12	Becici	Siskamling	Dukuh dan Ketua RT
13	Dadapan	LPMD, PKK, Lansia, Karang Taruna, Kelompok Ternak , Pengajian	Dukuh, RT, RW, Ta'mir masjid

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Berdasarkan data dalam tabel, terdapat 13 jenis organisasi yang tersebar di setiap Padukuhan di Kalurahan Wonokerto. Hal ini mencerminkan dinamika masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sosial sebagai bagian dari komunitas Kalurahan. Keberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut juga dapat menjadi indikator bahwa pembangunan di Kalurahan Wonokerto berjalan dengan baik.

## **2. Kondisi Ekonomi**

Kondisi perekonomian Kalurahan Wonokerto terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor utama adalah pertanian termasuk di dalamnya perkebunan salak, perikanan dan peternakan. Hal ini bisa dilihat dari mata pencaharian penduduk, yang rata-rata adalah petani Untuk sektor pertanian didominasi oleh pertanian/perkebunan salak pondoh yang merupakan pendapatan utama para petani dan merupakan sektor yang telah mengangkat perekonomian masyarakat Kalurahan Wonokerto. Akan tetapi lima tahun terakhir ini harga salak pondoh jantuh, harga di pasaran tidak bisa menutup biaya operasional dan biaya produksi. Saat ini banyak tanaman salak pondoh yang diganti dengan tanaman lain yang lebih menguntungkan.

Sektor jasa dan perdanganan meliputi padukuhan Tunggularum, Gondoarum, Sempu ,Banjarsari, Pojok dan Sangurejo yang dilalui jalan kabupaten dan provinsi banyak berdiri swalayan , warung makan, toko kelontong, pasar desa, took bahan bangunan , perbangkelan dan lain lain. Sektor perikanan di padukuhan kembang, pojok sebagian Sangurejo karena wilayah itu mempunyai ketersediaan sumber daya air baik di musim hujan maupun musim kemarau.

Di padukuhan Tunggularum, Gondoarum dan Manggungsari masih mengandalkan sector pertanian dan perkebunan lahan kering karena kondisi geografis merupakan tanah tegalan yang pada musim kemarau sangat kekurangan air untuk pertanian. Mengingat Desa Wonokerto merupakan kawasan rawan bencana. Fasilitas ekonomi dan perdagangan yang berada di

Kalurahan Wonokerto sudah cukup lengkap dan memadahi terutama untuk tingkat layanan dengan skala lokal. Pasar yang ada di Kalurahan telah melayani Kalurahan di sekitarnya.

### **3. Kondisi Budaya**

Budaya yang berkembang di Kalurahan Wonokerto adalah budaya masyarakat agraris, salah satunya adalah sifat gotong royong dan kekeluargaan masyarakatnya masih tinggi. Keberadaan kesenian di Kalurahan Wonokerto sangat beragam yang bernuansa adat jawa seperti kesenian jathilan, Kubro Siswo, Dayakan, Baduwi, Wayang Orang sampai yang bernuansa Islami seperti Hadroh. Semua berkembang dengan baik dan selaras dikarenakan masyarakat Kalurahan Wonokerto selain agamis juga mempunyai budaya kearifan lokal yang tinggi terhadap anggota masyarakat sekitar. Warga Kalurahan Wonokerto juga masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka sebagai orang Jawa seperti masih menjalankan/melaksanakan berbagai upacara-upacara tradisi yang berkaitan dengan daur hidup atau *life circle*, dianataranya adalah sebagai berikut :

- 1) Upacara Mitoni yaitu selamatan pada saat usia kehamilan mencapai genap 7 bulan.
- 2) Upacara Puputan yaitu upacara selamatan pada saat tali pusar bayi sudah lepas/mengering.
- 3) Jagongan yaitu acara wungon (tidak tidur semalam suntuk) atau bertandang di rumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada malam hari selama kurang lebih 7 malam (satu minggu).

- 4) Selapanan yaitu acara kenduri atau selamatan bertepatan dengan usia bayi 35 hari sebagai ucapan rasa syukur.
- 5) Upacara kematian, dari surtanah, upacara kenduri tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, setahun, dua tahun sampai 1000 hari.
- 6) Upacara khitanan yaitu tanda bahwa anak lelaki sudah mulai memasuki aqil balig menjadi laki-laki dewasa. Upacara pernikahan
- 7) dengan berbagai urutan pernak pernik tradisi jawa seperti siraman, midodareni, ijab, panggih dan resepsi.
- 8) Upacara Adat Merti Bumi sebagai icon Kalurahan wonokerto yang diwujudkan atas rasa syukur kepada Tuhan.
- 9) Upacara Adat Pager Bumi yang secara garis besar hampir sama dengan upacara adat merti bumi.
- 10) RT (Rukun Tetangga) kegiatannya cukup menonjol dan fanatic akan pembangunan baik dari penggeraan dan segi pembiayaan meski demikian kesatuan warga dusun masih tetap terpelihara. Even-even penting seperti peringatan hari besar nasional hari besar keagamaan dan kegiatan adat dilaksanakan rutin setiap tahunnya sehingga dalam kegiatan tersebut sebagai pembelajaran generasi penerusnya serta memberikan kesempatan kepada grup-grup seni budaya yang ada didalamnya untuk mengekspresikan kemampuannya. Semua kegiatan ini adalah sebuah bentuk realisasi masyarakat Kalurahan Wonokerto yang masih mengusung budaya kekeluargaan.

Adapun kegiatan budaya yang ada di Kalurahan Wonokerto yaitu

upacara-upacara seperti keterangan di atas dilaksanakan berbeda-beda seperti Merti Bumi dimana pelaksanaan Merti Bumi, Nyadran dan Jatilan serta Nyadran dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Adapun kegiatan budaya lain seperti Badui, Hadro dan Tari Topeng Ireng dilaksanakan setiap seminggu sekali yang dilaksanakan sebagai latihan. Kegiatan gotong royong dilaksanakan setiap per minggu di setiap Padukuhan yang ada di Kalurahan Wonokerto. Pelaksanaan gotong royong merupakan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan dengan sukarela oleh masyarakat yang ada di setiap Padukan.

Hal ini selain kegiatan tolong menolong juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar warga masyarakat Kalurahan Wonokerto. Kelompok RT (Rukun Tetangga) kegiatannya cukup menonjol terutama dalam pembangunan baik dari pekerjaan dan segi biaya meski demikian kesatuan warga dusun tetap terpelihara dengan baik. Even-even penting seperti peringatan hari-hari besar Nasional, hari besar keagamaan dan kegiatan adat dilaksanakan rutin setiap tahunnya kegiatan tersebut. Sehingga dalam kegiatan tersebut sebagai pembelajaran generasi penerusnya serta memberikan kesempatan kepada grup-grup seni budaya yang ada di dalamnya untuk mengekspresikan kemampuannya. Semua kegiatan ini adalah sebuah bentuk relasi masyarakat Kalurahan Wonokerto yang mengusung budaya kekeluargaan.

## **E. Sarana Prasaraan Kalurahan**

Kegiatan pembangunan sarana prasarana kalurahan dilakukan melalui fisik yang berhubungan dengan indikator pengembangan kalurahan meliputi peningkatan perhubungan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, serta peningkatan produksi. Perkembangan kalurahan merupakan wujud dari pembangunan fisik. Berikut ini akan diuraikan sarana prasarana Kalurahan Wonokerto.

### **a. Fasilitas Pemerintahan Dan Pelayanan Umum**

Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum yang terdapat di kalurahan Wonokerto antara lain kantor balai kalurahan, balai pertemuan, kantor dinas, gardu jaga, stasiun radio amatir, bengkel kerja, dan kantor lainnya yang paling banyak adalah gardu jaga dan tersebar di seluruh padukuhan di Kalurahan Wonokerto. Secara terperinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 3**  
**Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

No	Padukuhan	Kantor Balai Kalurahan	Balai Pertemuan	Kantor Dinas	Gardu Jaga	Radio/TV	Bengkel Kerja	Kantor KUA	Kantor Lain lain
1	Tunggularum	-	1	-	4	-	-	-	-
2	Gondoarum	-	-	-	4	-	-	-	-
3	Sempu	-	-	-	6	2	-	-	2
4	Banjarsari	-	1	-	3	-	-	-	-
5	Manggungsari	-	-	-	2	-	-	-	-
6	Imorejo	1	1	-	4	-	-	-	-
7	Jambusari	-	-	-	4	-	4	-	-
8	Dukuhsari	-	-	-	5	-	5	-	-
9	Kembang	-	1	-	3	-	7	-	-
10	Pojok	-	-	-	4	-	1	-	-
11	Sangurejo	-	-	1	4	-	6	1	-
12	Becici	-	-	-	8	-	2	-	-
13	Dadapan	-	-	-	6	-	2	-	-
Total		1	4	1	57	2	27	2	2

*Sumber : RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Berdasarkan pada data yang terdapat pada tabel diatas yang mendukung keberlangsungan pelayanan umum berupa Gardu Jaga berada disetiap padukuhan. Fasilitas ini menunjang pelaksanaan keamanan di tengah perumahan dan dapat mempengaruhi klien dalam memilih tempat hunian karena faktor keamanan dan lainnya. Jika dirincikan lebih lanjut maka Kantor Balai Kalurahan yang terdapat di Padukuhan Imorejo, balai pertemuan berjumlah 4 yang terletak di Padukuhan Tungguarum, Banjarsari, Imorejo, dan Padukuhan Kembang. Kantor Dinas hanya terdapat di Kalurahan Pojok. Gardu Jaga berjumlah 57 yang tersebar di semua Padukuhan, bahkan 12 Padukuhan Memiliki lebih dari 1 Gardu Jaga.

Radio/TV hanya terdapat di Padukuhan Sempu berjumlah 2 Tempat. Bengkel Kerja sebanyak 27 yang tersebar di 7 Padukuhan antara lain Padukuhan Jambusari, Dukuhsari, Kembang, 47 Pojok, Sangurejo, Becici, dan Padukuhan Dadapan. Kantor KUA hanya terdapat di Padukuhan Sangurejo. Kantor Lain-lain hanya terdapat di Padukuhan Gondoarum dengan jumlah 2 tempat.

**b. Fasilitas Kondisi Jaringan Jalan Kalurahan Wonokerto**

Komposisi status jalan yang ada di Kalurahan Wonokerto adalah jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan Kalurahan dan jalan lingkungan. Jalan Propinsi di Kalurahan Wonokerto menghubungkan antara Kalurahan Candi binangun dan Kalurahan lainnya seperti Kalurahan Wonokerto (Kecamatan Turi), Kalurahan Margorejo dan wonokerto (Kecamatan Tempel). Jalan Kalurahan yang ada menghubungkan antar padukuhan, seluruh padukuhan sudah terkoneksi menjadi sebuah sistem jaringan jalan Kalurahan . Jalan lingkungan adalah jalan-jalan yang berada lingkungan pemukiman. Hampir seluruh padukuhan di Kalurahan Wonokerto jenis konstruksi jalannya sudah beraspal. Selain aspal jenis lainnya adalah cor beton dan jalan tanah. Kondisi jalan yang ada di Kalurahan Wonokerto bervariasi mulai dari berkondisi baik, kondisi sedang sampai dengan kondisi rusak.

**c. Fasilitas Pendidikan**

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu barometer mengenai kesejahteraan. Kalurahan Wonokerto sendiri dalam peningkatan melek angka dan pemberantasan buta baca termasuk berhasil.

Berikut ini akan diuraikan dalam jumlah dan sebaran fasilitas Pendidikan Di Kalurhan Wonokerto

**Tabel 2. 4**  
**Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pendidikan**

No	Nama Padukuhan	PAUD	TK	SD	SMP	SMU/SMK
1	Tunggularum	1	-	-	-	-
2	Gondoarum	-	-	-	-	-
3	Sempu	1	1	1	-	-
4	Banjarsari		-	-	-	-
5	Manggungsari	-	1	1	-	-
6	Imorejo		1	1	-	-
7	Jambusari	1	-	1	-	-
8	Dukuharsi	1	-	-	-	-
9	Kembang	-	1	1	-	-
10	Pojok	-	-	-	-	-
11	Sangurejo	1	2	1	1	1
12	Becici	1	1	-	-	-
13	Dadapan		-	1	-	-
Jumlah		6	7	7	1	1

*Sumber : RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerton*

Dari data diatas, fasilitas pendidikan yang tersedia di Kalurahan Wonokerto cukup memadai Paud sampai Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meskipun secara umum fasilitas tersebut tergolong memadai, persebarannya masih belum merata. Setidaknya terdapat dua padukuhan yang belum memiliki fasilitas pendidikan sama sekali, sehingga menimbulkan kesenjangan akses pendidikan Padukuhan dalam lingkup Kalurahan.

#### **d. Fasilitas Kesehatan**

Fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah

pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dalam menunjang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kalurahan Wonokerto, terdapat beberapa Fasilitas Kesehatan yang akan diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 5**  
**Jumlah dan Seberan Fasilitas Kesehatan**

No	Nama Padukuhan	Puskesmas Pembantu	Posyandu	Poskesdes
1	Tunggularum	-	1	-
2	Gondoarum	1	1	-
3	Sempu	1	1	-
4	Banjarsari	1	3	1
5	Manggungsari	-	1	-
6	Imorejo	-	1	1
7	Jambusari	-	1	-
8	Dukuhsari	-	1	-
9	Kembang	-	1	-
10	Pojok	-	1	-
11	Sangurejo	-	3	-
12	Becici	-	4	-
13	Dadapan	-	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>20</b>	<b>2</b>

*Sumber RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kalurahan Wonokerto cukup lengkap. Terdapat 3 buah puskesmas pembantu di Padukuhan Gondoarum, Padukuhan Sempu dan Padukuhan Banjarsari. Selain itu, juga terdapat POSKESDES yang terletak di Padukuhan Imorejo dan Polindes di Padukuhan Banjarsari. Sedangkan posyandu terdapat pada 13 padukuhan yang ada di Kalurahan Wonokerto.

#### e. Fasilitas Peribadatan

Dalam Menunjang Kebutuhan Rohani masyarakat Kalurahan Wonokerto, terdapat beberapa Fasilitas Peribadatan yang tersebar di Masing-masing Padukuhan yang ada di Kalurahan Wonokerto. Berikut ini

akan disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 6**  
**Jumlah dan Sebaran Fasilitas Peribadatan**

No	Nama Padukuhan	Masjid	Mushola/Langgar	Gereja	Klenteng/Vihara
1	Tunggularum	1	-	-	-
2	Gondoarum	1	1	-	-
3	Sempu	4	1	-	-
4	Banjarsari	3	-	-	-
5	Manggungsari	1	-	-	-
6	Imorejo	4	-	-	-
7	Jambusari	2	2	-	-
8	Dukuhsari	2	1	-	-
9	Kembang	2	2	-	-
10	Pojok	3	3	-	-
11	Sangurejo	6	1	-	-
12	Becici	4	3	-	-
13	Dadapan	3	1	-	-
Jumlah		36	15	0	0

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Fasilitas peribadatan yang ada di Kalurahan Wonokerto terdiri dari masjid dan mushola/langgar. Hampir semua padukuhan di Kalurahan Wonokerto sudah memiliki tempat peribadatan masjid ataupun langgar/mushola. Sedangkan fasilitas peribadatan agama lain selain Islam, tidak terdapat di Wonokerto karena bisa dikatakan bahwa hampir semua penduduk Kalurahan Wonokerto beragama Islam. Untuk penduduk non muslim pelayanan peribadatan dilakukan di wilayah lain.

#### f. Fasilitas Perekonomian

Fasilitas perekonomian yang terdapat di Kalurahan Wonokerto terdiri dari pasar modern/ swalayan supermarket, pasar tradisional, ruko, toko bangunan, warung/kios dan warung PKL. Berikut ini di sajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. 7**  
**Jumlah Sebaran Fasilitas Perekonomian**

No	Padukuhan	Pasar Modern Swalayan Supermark et	Pasar Tradisional	Toko Bahan Bangunan	Ruko	toko	Warung/Kios	Warung PKL
1	Tunggularum	1	-	-	-	-	9	1
2	Gondoarum	1	-	-	-	1	3	-
3	Sempu	4	1	2	-	5	18	8
4	Banjarsari	1	-	1	-	3	8	2
5	Manggungsari	-	-	-	-	-	10	-
6	Imorejo	1	-	-	-	-	8	-
7	Jambusari	1	-	-	-	-	4	2
8	Dukuharsi	-	-	1	-	-	5	-
9	Kembang	-	1	-	-	-	8	-
10	Pojok	2	-	-	-	-	11	1
11	Sangurejo	4	-	3	-	14	12	4
12	Becici	-	-	-	-	-	6	-
13	Dadapan	-	-	-	-	-	7	-
Total		14	2	7	-	23	130	18

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Dari data yang berada pada tabel di atas, menunjukan bahwa pembangunan akan sarana prasarana penunjang aktivitas ekonomi di Kalurahan Wonokerto cukup memadai. Hal ini memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi dalam lanskap skala lokal. Pasar yang ada di Kalurahan Wonokerto tidak hanya melayani kegiatan perekonomian di wilayah wonokerto saja, tetapi telah melayani Kalurahan di sekitarnya.

## F. Pemerintah Kalurahan

### 1. Visi dan Misi

Berikut ini Visi dan Misi Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Visi

Sejahtera, Mandiri, Regulasi, Berbudaya dalam Lingkungan yang Lestari

## **Misi**

- 1) Meningkatkan penataan administrasi Kalurahan
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengubah system pelayanan, yaitu tidak hanya sebagai pelayan masyarakat tetapi sebagai Pamong yaitu orang yang bisa melindungi dan momong Masyarakat.
- 3) Penataan kinerja Pamong yaitu penerapan pelayanan yang maksimal.
- 4) Mewujudkan masyarakat WONOKERTO yang aman dan kondusif.
- 5) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui berbagai macam terobosan baru melalui bidang pertanian, peternakan, perikanan, wisata dan BUMKAL.
- 6) Menerapkan pembangunan dengan skala prioritas.
- 7) Menggali potensi lain yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat
- 8) Menjaga dan meningkatkan kelestarian alam.
- 9) Menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat WONOKERTO yang memiliki jiwa toleransi dalam beragama.
- 10) Meningkatkan kualitas dalam melaksanakan penerapan beragama.
- 11) Meningkatkan kualitas pendidikan.
- 12) Meningkatkan kualitas kesehatan.
- 13) Meingkatkan kualitas kepemudaan dalam wadah Karang Taruna.
- 14) Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan wonokerto

## **2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Wonokerto**

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kalurahan ,Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan, Pamong Kalurahan terdiri dari,

1. Sekretariat;
2. Pelaksana Teknis:
3. Pelaksana Kewilayahan,

Sekretariat terdiri dari :

- a) Kepala Urusan Tata Laksan
- b) Kepala Urusan Dhanarto dan
- c) Kepala Urusan Pangripto

Pelaksana Teknis terdiri dari :

- a) Jogoboyo
- b) Ulu ulu dan
- c) Kamituwo

Pelaksana Kewilayahan dikepalai oleh seorang dukuh , yang bertanggung jawab langsung Kepada Lurah, Wonokerto terdiri dari 13

Padukuhan. Mengenai nama nama dan jabatan Lurah , Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 8**  
**Data Keanggotaan Pemerintah Kalurahan Wonokerto**

No	Nama	Jabatan
1	Riyanto Sulistyo Budi, S.E	Lurah
2	Samijo, S,Sos	Carik
3	Didik Irwanto, A.Md	Jogoboyo
4	Tauqid Armunanto, S.Kom	Ulu-Ulu
5	Baroji	Kamitowo
6	Fera Arista Wardani, S.Pd	Toto Laksono
7	Septefi Dwi Prasetyo, S.E	Dhanarto
8	Drs Eko Wahyudi	Pangripto
9	Kristanto	Dukuh Tunggularum
10	Mustijo	Dukuh Gondoarum
11	Ridwan	Dukuh Sempu
12	Supangat	Dukuh Banjarsari
13	Rahmad Badawi	Dukuh Imorejo
14	Tri Hartono	Dukuh Manggungsari
15	Rebatman	Dukuh Jambusari
16	Ganjar Asmara	Dukuh Dukuhsari
17	Rahman Hidayat	Dukuh Kembang
18	Yayan Bintarto	Dukuh Pojok
19	Dhono Setiawan	Dukuh Becici
20	Sarmin	Dukuh Dadapan
21	Sehadi	Dukuh Sangurejo
22	Yunita Sari Widayanti, A.Md	Staf Carik
23	Danny Roesdhiana. A.Md	Staf Jogoboyo
24	Agus Hardono, A.Md	Staf Kamitowo
25	Aditya Yosefin Damarjati, S.E	Staf Ulu – Ulu
26	Feri Fitanto, S.Pd	Staf Kepala Urusan Dhanarto
27	Sulastri, S.Si	Staf Kepala Urusan Toto Laksono
28	Marjuni	Staf Pangripto
29	Farida Ika Rahma, S.Kep	Staf Pangripto
30	Jumingin	Penjaga Kantor

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Berikut ini akan diuraikan tentang tugas dan fungsi Pemerintahan Kalurahan Wonnokerto:

#### 1. Tugas dan Fungsi Lurah

Lurah berkedudukan sebagai kepala pemerintah kalurahan yang

memimpin penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Saat ini, Kalurahan Pagerharjo dipimpin oleh Riyanto Sulistyo Budi. Sebagai Lurah, Riyanto Sulistyo Budi bertugas menyelenggarakan pemerintahan kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan. Tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan kalurahan yang diemban oleh Riyanto Sulistyo Budi mencakup; tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kententeraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.

Tugas untuk melaksanakan pembangunan yang diemban oleh Riyanto Sulistyo Budi meliputi: pembangunan sarana prasarana kalurahan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Tugas untuk pembinaan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan tugas untuk pemberdayaan masyarakat meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, Karang Taruna. Selain itu, sebagai kepala pemerintahan di Kalurahan Wonokerto, Riyanto Sulistyo Budi juga bertugas untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## 2. Tugas dan Fungsi Carik

Carik adalah sebutan untuk Sekretaris di Kalurahan Wonokerto.

Carik 49 berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan Wonokerto. Saat ini, Carik Kalurahan Wonokerto dijabat oleh Samijo. Sebagai Carik, Samijo bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan.

Tugas Carik adalah sebagai berikut: Pertama, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyerat, arsip, dan ekspedisi. Kedua, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kalurahan, penyediaan prasarana perangkat kalurahan dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Ketiga, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya. Keempat, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan (APBKal), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### 3. Tugas dan Fungsi Jogoboyo

Jogoboyo berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pemerintahan dan keamanan. Saat ini, Jogoboyo Kalurahan Wonokerto dijabat oleh Didik Irwanto dan dibantu oleh seorang staf yaitu Danny Roesdhiana. Sebagai Jogoboyo, Didik Irwanto dan Danny Roesdhiana bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan dan keamanan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan

### 4. Tugas dan Fungsi Ulu-ulu

Ulu-Ulu berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pembangunan dan kemakmuran. Saat ini, Ulu-Ulu Kalurahan Wonokerto dijabat oleh Tauqid Armunanto dan dibantu oleh seorang staf yaitu Aditya Yosefin. Sebagai Ulu-Ulu, Tauqid Armunanto dan Aditya Yosefin bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pembangunan dan kemakmuran serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang tata ruang.

### 5. Tugas dan Fungsi Kamituwo

Kamituwo berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang kemasyarakatan. Saat ini, Kamituwo Kalurahan Wonokerto dijabat oleh Baroji dan dibantu oleh seorang staf yaitu Agus Hardono. Sebagai Kamituwo, Baroji dan Agus Hardono bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang sosial kemasyarakatan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang

kebudayaan.

#### 6. Tugas dan Fungsi Danarto

Danarto berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, Danarto Kalurahan Wonokerto dijabat oleh Septefi Dwi Prasetyo dan dibantu oleh seorang staf yaitu Feri Fitanto. Sebagai Danarto, Septefi Dwi Prasetyo dan Feri Fitanto bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan keuangan dan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

#### 7. Tugas dan Fungsi Toto Laksono

Toto Laksono Kalurahan Wonokerto diemban oleh Fera Arista dan dibantu oleh seorang staf yaitu Sulastri. Sebagai Toto Laksono, Fera Arista dan Sulastri mempunyai beberapa fungsi yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata 51 naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi pamong kalurahan, penyediaan pamong kalurahan, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Singkatnya, Toto Laksono bertugas membantu carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

#### 8. Tugas dan Fungsi Pangripto

Pangripto berkedudukan sebagai unsur pembantu lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, Pangripto Kalurahan Wonokerto dijabat oleh

Eko Wahyudi dan dibantu oleh dua orang staf yaitu Marjuni dan Farida Ika. Seaga Pangripto, Eko Wahyudi, Marjuni, dan Farida Ika bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan ketatausahaan, umum dan perencanaan.

#### 9. Tugas dan Fungsi Dukuh

Setiap padukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh. Dukuh berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Dukuh memiliki fungsi sebagai berikut: Pertama, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. Kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Ketiga, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keempat, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kepala Kalurahan tidak berdiri secara sendiri tetapi juga didukung oleh perangkat-perangkat dibawahnya yang menjadi, instrumen dalam keberlangsungan terhadap pelayanan dan program kerja Kalurahan menuju kemajuan dan kemandirian. Dalam menjalankan tugas, Lurah bersama

Pamong Kalurahan akan selalu berdinamika dan “berhadapan” dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). BPKal merupakan lembaga yang melakukan akuntabilitas horizontal. BPKal merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Di Sisi yang lain juga ada kontrol terhadap proses kerja pemerintah Kalurahan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dalam hal ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang dipilih secara demokratis kemudian menjadi wakil dari kelompok masyarakat yang menjadi mitra pemerintah Kalurahan dalam menjalankan proses roda organisasi pemerintah Kalurahan Wonokerto.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa BPKal mempunyai dua fungsi yaitu fungsi hukum dan fungsi politik. Fungsi hukum yaitu membahas dan menyepakati 54 Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah. Sedangkan fungsi politik BPKal terdiri dari: *Pertama*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Kedua*, pengawasan kinerja Lurah. *Ketiga*, menyelenggarakan musyawarah kalurahan

## **BAB III**

### **FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN WONOKERTO DALAM PENGUATAN EKONOMI KREATIF MELALUI KELOMPOK PEREMPUAN**

Pada bab ini, peneliti akan mendalami lebih lanjut mengenai peran fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam penguatan ekonomi kreatif melalui kelompok perempuan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilandasi oleh fokus kajian serta temuan lapangan. Oleh karena itu, data yang diperoleh akan disajikan secara rinci dan eksplisit guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan peneliti kepada para informan, melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti memperoleh data dari para informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan batasan-batasan dalam penelitian ini. Pada tahap berikutnya, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari proses analisis data ini adalah untuk menyederhanakan dan menyusun informasi secara sistematis, guna memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana proses fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dalam penguatan ekonomi kreatif melalui kelompok perempuan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fasilitasi Pemerintah Kalurahan adalah aktivitas yang dilakukan pemerintah kalurahan dalam mendukung kehidupan masyarakat di Kalurahan melalui kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, kehadiran Pemerintah Kalurahan diharapkan mampu memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam

meningkatkan taraf hidupnya dengan berkontribusi secara langung dalam kegiatan ekonomi, serta meningkatkan pembangunan di tingkat kalurahan. Pada konteks ini, pemerintah kalurahan memiliki peran yang penting dalam memberdayakan masyarakat, terutama perempuan, secara konkret hal ini dapat dilakukan melalui program-program yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Dalam pembahasan selanjutnya peneliti akan menyajikan dan membahas lebih dalam dengan mengkerucutkan pada tiga sub bab berikut ini;

#### **A. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan melalui Dukungan Anggaran**

Pemerintah Kalurahan Wonokerto merupakan suatu institusi sekaligus subjek yang memiliki wewenang yang dalam melakukan Fasilitasi penguatan ekonomi kreatif di tingkat desa. Salah satu bentuk fasilitasi yang krusial adalah melalui dukungan anggaran desa yang diarahkan untuk mendukung program-program ekonomi kreatif masyarakat. Dukungan anggaran ini tidak hanya dipahami sebagai penyediaan dana, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pemerintah kalurahan dalam memberi ruang bagi berkembangnya usaha kreatif masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada sejauh mana fasilitasi pemerintah kalurahan, khususnya melalui alokasi dan pemanfaatan anggaran desa, mampu mendorong penguatan ekonomi kreatif di Kalurahan Wonokerto. Fokus kajian ditujukan untuk mengidentifikasi bentuk dukungan anggaran, efektivitas penggunaannya, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha kreatif yang dijalankan oleh kelompok perempuan seperti Desa Prima, PKK, dan Kelompok Wanita Tani. Untuk menelaah lebih jauh

terkait fasilitasi pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam Penguatan Ekonomi Kreatif Melalui Kelompok Perempuan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berikut ini saya akan menyajikan hasil wawancara dengan Riyanto Sulistiyo Budi selaku Lurah Wonokerto, beliau mengatakan bahwa:

"Alokasi dana desa untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif diarahkan melalui pos-pos anggaran yang tercantum dalam APBKAL, khususnya yang berkaitan dengan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dari anggaran tersebut kemudian disalurkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk UMKM dan sektor pertanian. Kelompok perempuan seperti Desa Prima, PKK, maupun KWT juga menjadi bagian dari sasaran penerima dukungan anggaran ini, terutama dalam program-program yang mendorong peningkatan kapasitas dan hasil usaha kreatif mereka." (Wawancara, 27 Februari 2025)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pemerintah kalurahan telah berupaya mendukung peningkatan ekonomi kreatif melalui penyediaan dukungan finansial. Dukungan anggaran ini diarahkan agar kelompok perempuan, seperti Desa Prima, PKK, dan KWT, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha kreatif yang mereka kelola. Dalam konteks ini, pemerintah kalurahan perlu memastikan bahwa fasilitasi yang disediakan dapat berjalan efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif kelompok perempuan dan monitoring terhadap efektivitas dukungan biaya tersebut dalam meningkatkan penguatan ekonomi kreatif kelompok perempuan. Selanjutnya dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Alokasi APBKal Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

No	Sub Bidang	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	<b>Pertanian dan Peternakan</b>	<b>290.000.000.00</b>	<b>DDS</b>
	➤ Pemiliharaan Irigasi Tersier/sederhana	20.000.000.00	
	Belanja Modal	20.000.000.00	
	➤ Pembangunan/rehabilitas/peningkatan Saluran Irigasi tersier/sederhana	250.000.000.00	DDS
	Belanja Modal	250.000.000.00	
	➤ Fasilitasi Pembangunan P3A	10.000.000.00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.00	
	➤ Pembinaan dan pelatihan Kelompok Tani	10.000.000.00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.00	
2.	<b>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga</b>	<b>57.000.000.00</b>	
	➤ Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000.00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000.00	
	➤ Fasilitas/Pendampingan Desa ramah Anak dan Keluarga	7.500.000.00	DDS
	Belanja Barang dah Jasa	7.500.000.00	
	➤ Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa	25.000.000.00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000.00	
3	<b>Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>20.000.000.00</b>	
	➤ Pelatihan manajemen Koperasi/KUD/UMKM	20.000.000.00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000.00	
4	<b>Dukungan dan Penanaman Modal</b>	<b>115.000.000.00</b>	
	➤ Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (yang di laksanakan oleh Pemdes)	15.000.000.00	DDS
	Belanja Modal	15.000.000.00	
	➤ Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	100.000.000.00	DDS
	Belanja Modal	100.000.000.00	

*Sumber :APBKal 2024 Kalurahan Wonokerto*

Dari tabel diatas, upaya pemerintah kalurahan dalam penguatan ekonomi kreatif adalah masuk dalam sub bidang pemberdayaan perempuan, dukungan tersebut berupa anggaran yang telah diatur dalam peraturan kalurahan. Nah

untuk menelaah lebih lanjut terkait Bagaimana mekanisme perencanaan anggaran desa yang melibatkan kelompok perempuan, akan disampaikan oleh Sumijo selaku Carik, ia mengatakan bahwa:

”Dalam proses perencanaan anggaran desa, kelompok perempuan diundang melalui musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi dan usulan program. Usulan dari kelompok seperti Desa Prima, PKK, dan KWT. Usulan-usulan tersebut kemudian dibahas bersama perangkat desa untuk dipertimbangkan masuk ke dalam rencana kerja desa dan, apabila disepakati, dapat dialokasikan melalui APBKal ” (Wawancara, 27 Februari 2025)

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa mekanisme perencanaan anggaran desa di Kalurahan Wonokerto telah membuka ruang partisipasi bagi kelompok perempuan melalui forum musyawarah desa. Usulan-usulan yang diajukan seringkali bergantung pada prioritas pemerintah kalurahan dan ketersediaan anggaran, sehingga tidak semua program yang diusulkan dapat terakomodasi.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peluang bagi kelompok perempuan untuk berkontribusi dalam perencanaan anggaran, efektivitas pelibatan mereka masih dipengaruhi oleh proses seleksi prioritas dan kapasitas kelompok dalam merumuskan usulan yang sesuai dengan arah kebijakan desa. Selanjutnya untuk menalaah lebih jauh bagaimana fasilitasi pemerintah kalurahan, telah di sampaikan oleh Tarjo selaku BPKal:

”kalau pemerintah tetap medukung dari segi anggaran, segi motivasi tetap didukung. seperti umkm, Tetap dianggarkan untuk peningkatan kapasitas untuk menunjang perekonomian diwonokerto.” (Wawancara, 3 Maret 2025)

Dalam konteks ini, pemerintah kalurahan wonokerto memiliki peran sebagai pengatur dan fasilitator dalam mendukung pengembangan ekonomi

kreatif kelompok perempuan. Dengan demikian, pemerintah kalurahan wonokerto diharapkan dapat memastikan bahwa dukungan yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien dalam meningkatkan penguatan ekonomi kreatif kelompok perempuan.

Lebih lanjut, ditambahkan juga dari pihak Kamituwo sebagai perangakat kalurahan yang berimplikasi langsung dengan perempuan, disampaikan oleh Agus Hardono selaku staf Kamituwo;

”Terkait perempuan disini kita mempunyai desaprima yang mana desaprima itu semua isinya dari perempuan-perempuan. Jadi merekalah yang mempunyai usaha-usaha, mungkin bisa usaha dari makanan atau kuliner, kerajinan, itu dijadikan satu pada kelompok desaprima, itu berbeda dengan UMKM. Karena UMKM kan ada banyak unsurnya seperti unsur dari kaum bapak-bapak, kaum ibu-ibu dan anak-anak yang punya usaha itu masuknya di UMKM. Sedangkan desa prima khusus perempuan yang dikategorikan mempunyai keluarga kartu dan keluarga miskin jadi itu mengangkat dan membantu ekonomi keluarga.”

(Wawancara, 3 April 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas pemerintah kalurahan memiliki program khusus yakni desa prima, adalah sebuah program yang bertujuan meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam suatu wilayah melalui peningkatan produktivitas ekonomi. Adapun yang menjadi sasarannya adalah kelompok perempuan yang dikategorikan sebagai keluarga miskin. Pemerintah Kalurahan mempunyai andil untuk mendukung kelompok perempuan yang rentan secara ekonomi. Hadirnya program desa prima, pemerintah kalurahan dapat membantu meningkatkan ekonomi kreatif kelompok perempuan tersebut. Jika di kontekskan pada konsep fasilitasi hadirnya pemerintah desa wonokerto dapat di maknai sebagai institusi yang telah melakukan intervensi melalui kebijakannya

dalam memudahkan kelompok perempuan dapat terakomodasi dalam kelompok desa prima.

Untuk mengkaji lebih jauh terkait fasilitasi pemerintah kalurahan, peneliti juga mewancarai Ibu Siti selaku ketua Desa Prima;

”Dalam perkembangan ekonomi kreatif, Disini cukup mendukung dalm bentuk program, dalam hal dukungan anggaran. karna Ya kan semua tidak bisa program itu bisa berjalan Kalau ada anggarannya tanpa ada anggaran kan nggak bisa berjalan. Adapun programnya bisa melalui pameran dan expo” (wawancara 18 Maret 2025)

Berikut ini kegiatan pameran yang telah diikuti pelaku UMKM di Kalurahan Wonokerto:

**Gambar 3.1**  
**Pelaksanaan Pameran gelar UMKM**



*Sumber: <https://jogjakeren.com/gelar-umkm-dan-potensi-kapanewon-turi-semarakkan-hut-ke-78-ri-dan-11-tahun-keistimewaan-diy/>.*  
*Diakses pada 22 juni 2025*

Berdasarkan pernyataan dan gambar diatas selain menunjukkan bahwa dukungan anggaran sangat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah Kalurahan memandang bahwa program-program ekonomi kreatif tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai. Dalam konteks konsep fasilitasi ekonomi kreatif, pernyataan tersebut menunjukkan

bahwa pemerintah kalurahan memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan anggaran untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif.

Fasilitasi ekonomi kreatif dalam hal ini dapat diartikan sebagai upaya pemerintah kalurahan untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi kreatif, seperti anggaran, infrastruktur, dan pelatihan. Dengan adanya dukungan anggaran, program-program ekonomi kreatif dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan ekonomi kreatif di Kalurahan.

Dalam setiap proses penguatan ekonomi kreatif maka perlu juga di kaji bagaimana perlu juga dikaji apa saja program yang telah di beri dukungan kepada kelompok perempuan di Kalurahan Wonokerto lebih lanjut di jelaskan oleh Riyanto Sulistiyo Budi selaku Lurah Wonokerto;

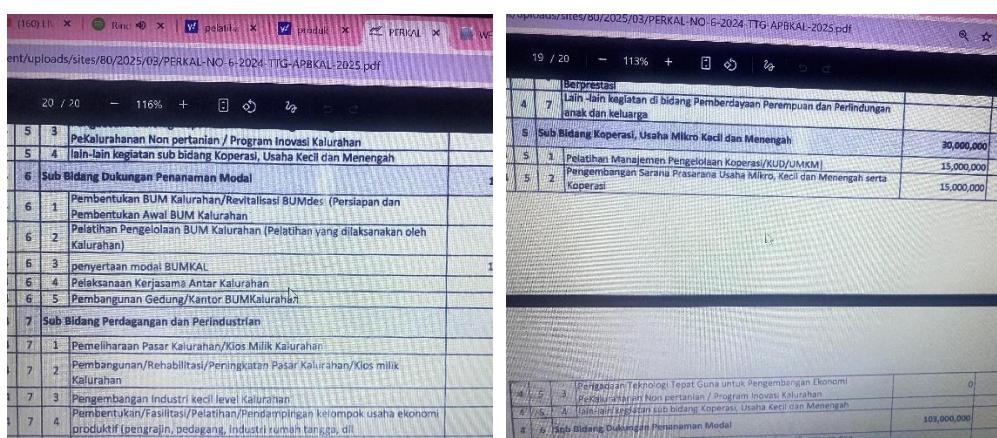
"Ada beberapa usulan yang disampaikan kelompok perempuan, tapi tidak semuanya bisa dijalankan karena terbatasnya anggaran. Misalnya dari Desa Prima pernah mengusulkan pelatihan pemasaran online dan modal usaha untuk mengembangkan olahan salak, tapi baru sebagian pelatihan yang terlaksana. Dari PKK juga sempat mengusulkan pengadaan alat produksi skala kecil untuk membuat jajanan, tapi akhirnya belum bisa direalisasikan. Begitu juga KWT pernah mengusulkan pembangunan rumah produksi sederhana, namun karena anggaran lebih diprioritaskan ke kegiatan fisik desa. Sehingga belum dapat diwujudkan" (Wawancara, 27 juni 2025)

Dari keterangan tersebut terlihat bahwa memang ada dukungan dana desa untuk kegiatan ekonomi kreatif kelompok perempuan, tetapi tidak semua usulan bisa dijalankan. Keterbatasan anggaran dan banyaknya prioritas lain di desa membuat beberapa rencana, seperti pelatihan pemasaran online, pengadaan alat produksi, atau pembangunan rumah produksi sederhana, belum bisa terealisasi.

Akibatnya, kegiatan yang dilakukan masih sebatas pelatihan dasar dan bantuan alat sederhana.

Berikut ini dalam APBKAL untuk penanaman modal, alokasi anggaran untuk ekonomi kreatif yang merupakan bagian dari UMKM belum menjadi fokus utama, hal ini dapat di lihat dalam gambar berikut:

**Gambar 3.2**  
**Alokasi Anggaran dalam APBKAL**



Berprestasi	
4	7 Lain-lain kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan keluarga
5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	3 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM   Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
5	30,000,000
5	3 Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan
5	3 Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kalurahan)
5	3 penyertaan modal BUMKAL
5	4 Pelaksanaan Kerjasama Antar Kalurahan
5	5 Pembangunan Gedung/Kantor BUMKALurahan
7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
7	1 Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
7	2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kalurahan/Kios milik Kalurahan
7	3 Pengembangan Industri kecil level Kalurahan
7	4 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dkk)
7	109,000,000
7	3 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pekalurahan Non pertanian / Program Inovasi Kalurahan
7	3 Pelatihan Manajemen Pengelolaan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	3 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

*Sumber : Dokumentasi Peneliti APBKAL 2025*

Sehingga dari dokumen diatas maka pada sub bidang penanaman modal dan pemberdayaan masyarakat, alokasi anggaran untuk mendukung program ekonomi kreatif masih belum menjadi prioritas utama. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitasi program dan pemberdayaan dilakukan, dukungan anggaran yang terbatas berimplikasi langsung pada belum optimalnya hasil penguatan ekonomi kreatif yang dijalankan melalui kelompok perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kelompok perempuan sudah dilibatkan dalam proses perencanaan, hasil yang mereka terima masih bergantung pada kemampuan keuangan desa dan kebijakan prioritas yang

ditetapkan pemerintah kalurahan. Lebih lanjut di jelaskan oleh Agus Hardono selaku staf Kamituwo;

"Proses penyaluran dana desa untuk program ekonomi kreatif biasanya dilakukan setelah usulan kegiatan dibahas dalam musyawarah desa. Kegiatan yang didanai umumnya berupa pembinaan atau pelatihan bagi KWT dan UMKM yang dilaksanakan minimal setahun sekali, sedangkan pertemuan rutin kelompok bisa dilakukan sewaktu-waktu. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kalurahan sering bekerja sama dengan dinas terkait, misalnya dinas pertanian untuk KWT. Namun, karena keterbatasan anggaran desa, jika ada kebutuhan dana tambahan kelompok biasanya juga diarahkan membuat proposal kepada anggota dewan agar bisa difasilitasi melalui aspirasi." (Wawancara, 3 Maret 2025)

Dari keterangan tersebut terlihat bahwa proses penyaluran dana desa di Kalurahan Wonokerto dilakukan melalui mekanisme pembinaan yang diinisiasi pemerintah desa sebagai bentuk fasilitasi kepada kelompok perempuan. Pola ini menunjukkan bahwa peran pemerintah masih dominan pada aspek penyediaan kegiatan dan pendampingan, sementara pengelolaan langsung oleh kelompok perempuan masih terbatas. Dalam konteks ekonomi kreatif, pendekatan seperti ini berpotensi membantu meningkatkan kapasitas pelaku, tetapi juga dapat mengurangi fleksibilitas kelompok untuk mengembangkan inisiatif sendiri karena aliran dana sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah dan sering kali bergantung pada aspirasi pihak luar. Dengan demikian, fasilitasi pemerintah sudah menjadi faktor pendukung, tetapi tantangannya adalah bagaimana membuat mekanisme penyaluran lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan nyata kelompok perempuan. Berikut ini salah satu pelaksanaan pelatihan bagi kelompok perempuan;

**Gambar 3.3**  
**Pelaksanaan pelatihan pembuatan Manik-manik PKK**



*Sumber: website desa Wonokerto (SIDEWO)*

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasannya Kegiatan pelatihan yang diikuti kader PKK Wonokerto sebagaimana ditunjukkan pada foto tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya fasilitasi pemerintah kalurahan dalam membangun kapasitas sumber daya manusia Perempuan. Hal ini dapat dimaknai bahwa penyaluran dana desa untuk program ekonomi kreatif kelompok perempuan di Kalurahan Wonokerto dijalankan melalui mekanisme formal perencanaan dan disalurkan dalam bentuk kegiatan pelatihan atau pembinaan.

Lebih lanjut akan di bahas bagaiman dampak secara dukungan anggaran desa terhadap perkembangan usaha ekonomi kreatif yang dijalankan kelompok perempuan yang disampaikan oleh Ibu Yati selaku ketua PKK;

"Kalau dari PKK, dampak dukungan anggaran desa itu terasa terutama saat ada pelatihan atau pameran. Misalnya kami diajari membuat jajanan berbahan salak dan diberi fasilitas untuk ikut bazar di acara desa. Jadi ada tambahan pengetahuan dan kesempatan mengenalkan produk. Tapi untuk usaha berkelanjutan, menurut saya masih terbatas karena setelah pelatihan selesai belum ada pendampingan rutin." (Wawancara 3 Maret 2025)

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ibu Siti selaku ketua Desa Prima;

"Untuk Desa Prima, dampaknya ada pada peningkatan keterampilan anggota. Kami pernah dapat pelatihan olahan makanan dan

kerajinan tangan. Itu membuat ibu-ibu punya ide usaha di rumah. Hanya saja hasilnya belum terlalu besar karena bantuan yang diberikan sifatnya sekali-sekali. Jadi usaha berjalan, tapi belum maksimal karena keterbatasan modal dan pasar." (wawancara 18 Maret 2025)

Kedua pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dukungan anggaran desa bagi kelompok perempuan di Kalurahan Wonokerto berdampak positif terutama pada tahap awal, yaitu berupa peningkatan keterampilan, penyediaan peralatan sederhana, dan kesempatan memperkenalkan produk melalui kegiatan pelatihan atau pameran. Dampak ini selaras dengan fungsi fasilitasi pemerintah yang berperan memicu tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal seperti olahan salak dan kerajinan tangan. Namun, dampak jangka panjangnya masih terbatas karena setelah kegiatan berlangsung, kelompok perempuan masih menghadapi kendala akses modal lanjutan, pendampingan berkelanjutan, dan pengembangan pasar.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti yang menunjukkan bahwa kemampuan pemasaran pelaku ekonomi kreatif di Kalurahan Wonokerto masih sangat terbatas. Kondisi tersebut ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan media, khususnya media digital, sebagai sarana utama dalam mempromosikan produk mereka.

Dengan demikian, dukungan anggaran desa sejauh ini lebih efektif sebagai stimulan awal daripada sebagai strategi penguatan ekonomi kreatif yang berkesinambungan. Berikut ini hasil produksi ekonomi kreatif di Kalurahan Wonokerto;

**Gambar 3.4**  
**Produk Olahan Salak**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti 18Maret 2025*

Display di atas merupakan output dari produk olahan salak yang merupakan sebagai citra kreativitas Kalurahan Wonokerto. Produk ini merupakan simbol potensi identitas desa yang digunakan dalam hasil penyaluran anggaran dan produksi oleh kelompok perempuan seperti Desa Prima maupun PKK.

Lebih lanjut akan di jelaskan bagaimana Bagaimana strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan anggaran untuk memperkuat usaha ekonomi kreatif kelompok perempuan yang di sampaikan oleh Riyanto Sulistiyo Budi selaku Lurah Wonokerto, beliau mengatakan bahwa:

"Strategi kami di kalurahan dalam mengoptimalkan anggaran untuk mendukung usaha ekonomi kreatif kelompok perempuan dilakukan dengan cara memprioritaskan kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan. Setiap tahun sebagian anggaran dialokasikan untuk pelatihan olahan salak, kewirausahaan, menjahit, dan kerajinan yang melibatkan PKK, Desa Prima, dan KWT. Selain itu, kami memfasilitasi peralatan dasar seperti kompor, alat pengolah salak, atau perlengkapan menjahit sesuai kebutuhan kelompok. Kami juga memberi kesempatan bagi kelompok perempuan untuk ikut dalam pameran dan bazar tingkat desa maupun kecamatan sebagai bagian dari promosi produk. Jadi fokus penggunaan anggaran lebih pada penguatan kemampuan dan sarana dasar agar ibu-ibu bisa mandiri, sementara bantuan dalam bentuk uang tunai belum kami jalankan karena anggarannya terbatas dan harus dibagi merata." (Wawancara, 2025)

Strategi pemerintah Kalurahan Wonokerto yang memfokuskan penggunaan anggaran pada pelatihan, penyediaan sarana dasar, dan fasilitasi promosi bagi kelompok perempuan menunjukkan bahwa pola fasilitasi yang diterapkan masih berada pada tahap pemberdayaan awal. Langkah ini sejalan dengan konsep fasilitasi dalam pembangunan masyarakat, di mana pemerintah berperan sebagai penggerak dan penyedia stimulus agar kelompok perempuan mampu memanfaatkan potensi lokal seperti salak dan kerajinan sebagai usaha kreatif.

Namun, strategi ini juga mengindikasikan bahwa penguatan ekonomi kreatif masih terbatas pada peningkatan kapasitas individu dan belum menyentuh aspek pengembangan usaha secara lebih luas, seperti modal berkelanjutan, manajemen usaha, dan jaringan pasar. Dengan demikian, dampak yang dihasilkan bersifat jangka pendek sebagai pemicu awal, sementara keberlanjutan usaha kreatif sangat bergantung pada tindak lanjut pendampingan dan diversifikasi program di masa depan.

Dari keseluruhan urain di atas melalui wawancara, dokumentasi dan Observasi, fasilitasi pemerintah kalurahan melalui dukungan anggaran dalam penguatan ekonomi kreatif dapat di katakan Fasilitasi pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui dukungan anggaran desa terbukti berperan penting dalam memicu berkembangnya ekonomi kreatif di tingkat lokal. Dukungan anggaran yang dialokasikan melalui APBKAL diarahkan terutama pada kegiatan pelatihan keterampilan, pembinaan kelompok perempuan, penyediaan sarana dasar, dan kesempatan mengikuti pameran. Bentuk fasilitasi ini menjadi bukti komitmen pemerintah kalurahan dalam memberi ruang bagi kelompok perempuan, seperti

Desa Prima, PKK, dan KWT untuk memanfaatkan potensi lokal, terutama produk olahan salak dan kerajinan, sebagai sumber penghasilan. Peran pemerintah dalam konteks ini tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga bertindak sebagai penggerak dan penghubung dengan berbagai pihak untuk membangun kapasitas awal pelaku usaha kreatif.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan anggaran ini masih bersifat stimulan jangka pendek. Banyak program yang diusulkan kelompok perempuan belum sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan desa. Dampaknya, fasilitasi yang diberikan lebih banyak meningkatkan keterampilan dasar dan membuka peluang usaha awal, namun belum menyentuh aspek penting seperti pendampingan berkelanjutan, akses modal lanjutan, dan penguatan jaringan pasar. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah kalurahan sebagai fasilitator sudah berjalan, tetapi masih memerlukan strategi yang lebih responsif dan berkelanjutan agar dukungan anggaran benar-benar mampu memperkuat ekonomi kreatif sekaligus memberdayakan perempuan secara optimal.

## **B. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan melalui Program dan Pemberdayaan**

### **Sumber Daya Manusia**

Dalam pembahasan ini peneliti akan memfokuskan untuk untuk menganalisis dan memahami bagaimana Pemerintah Kalurahan Wonokerto melaksanakan fasilitasi melalui program dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan dipahami sebagai proses membangun kapasitas dan

kepercayaan diri kelompok perempuan agar mampu berdaya secara sosial dan ekonomi dalam mengelola usaha ekonomi kreatif.

Peran fasilitatif Pemerintah Kalurahan menjadi krusial dalam menciptakan akses, dukungan, dan kebijakan yang memungkinkan kelompok perempuan mengembangkan keterampilan, memperluas partisipasi, serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap penguatan ekonomi kreatif di tingkat lokal. Untuk menelaah lebih jauh pemberdayaan perempuan di Kalurahan Wonokerto, pembahasan ini diawali dengan uraian mengenai peran Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan perempuan. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Riyanto Sulistiyo Budi selaku Lurah Wonokerto yang menjelaskan bahw:

“memfasilitasi itu sesuai dengan keinginan dari masyarakat dan sesuai dengan RPJM yang ada kita tuangkan dalam apbk kita anggarkan kita melaksanakan kegiatan apa yang menjadi permintaan dari masyarakat itu sendiri itu salah satunya kita mendukung kegiatan untuk ekonomi kreatif dari wanita. Anggaran apa aja anggaran itu kami bisa menyisipkan itu kan kami kan ada anggaran dana desa, Pendapatan asli Desa, bagi hasil kemudian tidak menutup kemungkinan pokok pikiran dewan Nah itu kan juga dewan itu juga melaksanakan dari itu dari aspirasi dari masyarakat yang disampaikan ke dewan bisa dilaksanakan dikalurahan wonokerto.” (Wawancara, 27 Februari 2025)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan telah menjalankan perannya sebagai perantara antara kebutuhan warga dengan sumber daya yang tersedia. Jika dianalisis melalui pendekatan governing, arah kebijakan Pemerintah Kalurahan Wonokerto didasarkan pada aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Melalui pemanfaatan berbagai sumber anggaran, seperti Dana Desa, Pendapatan Asli Desa (PAD), dan Dana Bagi Hasil, Pemerintah Kalurahan kemudian mengalokasikan sumber daya

tersebut untuk mendukung program-program pemberdayaan. Berikut ini Dokumen data alokasi anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Wonokerto:

**Gambar 3.5**  
**Alokasi Anggaran Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan dan Penulisan Pemberdayaan Perempuan

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
4.4.1	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.4.1 5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
4.4.1 5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Ppe	80.000,00	80.000,00	0,00
4.4.1 5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4.4.1 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
4.4.1 5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiat	780.000,00	780.000,00	0,00
4.4.1 5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	360.000,00	360.000,00	0,00
4.4.1 5.2.3.	Belanja Pengeluaran Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.4.1 5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Printed by user@... 09/03/2021 12:57:34 Halaman 18

Realisasi 4.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
4.4.1 5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.4.1 5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.4.1				

Sumber :Dokumentasi Perkal No 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Tahun 2025

Jika mengacu pada data diatas maka dapat dipahami bahwasannya alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan di Kalurahan Wonokerto telah berjalan sesuai upaya fasilitasi pemerintah Kalurahan dalam penguatan ekonomi kreatif melalui kelompok perempuan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai program pelatihan, pengembangan kapasitas, pendampingan usaha, hingga promosi produk, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian ekonomi perempuan di wilayah Kalurahan.

Namun disisi lain pemerintah kalurahan cenderung bersifat reaktif dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok perempuan, yakni dengan menunggu aspirasi atau permintaan masyarakat terlebih dahulu. Sedangkan idealnya pemerintah Kalurahan harus bersifat proaktif dalam merancang program-program yang visioner dan efektif melalui *Action Plan* atau rencana strategis yang matang. Lebih lanjut akan disampaikan juga oleh Yati sebagai PKK;

”Selama ini, kami melihat bahwa pemerintah Kalurahan memang cukup terbuka dalam mendukung pemberdayaan perempuan, terutama jika ada aspirasi atau usulan dari masyarakat. Misalnya, kalau ada kelompok perempuan yang mengajukan pelatihan atau kegiatan ekonomi kreatif, biasanya difasilitasi, baik dari sisi tempat, pelatih, maupun dukungan anggaran.” (Wawancara 3 Maret 2025)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwasannya responsifitas pemerintah kalurahan terhadap aspirasi masyarakat cukup baik, akan tetapi pendekatan pemberdayaan yang dijalankan belum berbasis pada pemetaan potensi atau kebutuhan jangka panjang. Dalam konteks ekonomi kreatif, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi terciptanya pemberdayaan perempuan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Perihal program pemberdaya di afirmasi oleh Tarjo selaku ketua BPKal bahwasannya;

”kalau dari kalurahan itu seperti pembinaan KWT, pembinaan UMKM, dan masih banyak produk atau bidang lainnya. Dan terkait pembinaan minimal setahun sekali pembinaan peningkatan kapasitas kalau hanya untuk pertemuan itu bisa kapan saja, nah untuk pembinaan sendiri, kita bekerja sama dengan dinas pertanian, itukan ada kaitannya dengan KWT. akan tetapi disini menggandeng bersama dewan dengan anggota dewan juga. setiap anggaran yang diperlukan itu berasal dari dewan untuk aspirasi masyarakat. misalnya KWT membutuhkan dana, itu akan ditujuhkan kepada

dewan dan membuat proposal dari kelompok-kelompok itu sendiri karena anggarannya terbatas.” (Wawancara 3 Maret 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas pemerintah kalurahan memiliki beberapa program pembinaan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif, seperti pembinaan KWT (Kelompok Wanita Tani) dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pemerintah Kalurahan juga bekerja sama dengan dinas pertanian dan dewan untuk mendukung program-program tersebut. Selain itu, Pemerintah kalurahan juga memfasilitasi anggaran dengan membangun kerja sama dengan anggota dewan untuk mendapatkan anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung program tersebut. Hal ini juga ditambahkan juga oleh Agus Hardono selaku staf kamitudo;

”Kalau masalah program dari desa itu sifatnya kita memberikan stimulan untuk pertemuan, itu nantik sudah lumayan berkembang ada 30-an lebih anggotanya, terus dari produk-produk yang dihasilkan itu sudah banyak dipasarkan secara umum banyak olahan dari produk lokal contohnya salak, dijadikan dodol salak, geplak salak, dan ada kerajinan dari bambu itu semua dipasarkan. Untuk pemasarannya sendiri itu sudah ada yang sampai ketingkat nasional bahkan sampai dieksport keluar negeri, itu sudah menjadi kebanggaan pemerintah.” (Wawancara 3 Maret 2025)

Dari penyampaian di atas pemerintah desa memiliki program untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di desa dengan memberikan stimulan untuk pertemuan dan pengembangan produk lokal. Program ini telah berhasil meningkatkan jumlah anggota dan produk yang dihasilkan, serta memperluas pasar produk-produk tersebut hingga tingkat nasional dan bahkan internasional. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki kesadaran bahwa pengembangan ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu,

pemerintah desa terus mendukung dan mengembangkan program-program tersebut untuk meningkatkan ekonomi desa.

Namun disisi lain juga pemerintah Kalurahan juga belum sepenuhnya optimal dalam hal memberikan pendampingan, hal ini disampaikan oleh Ibu Erwanti selaku anggota pokdarwis.

”Fasilitasi yang dilakukan masih bersifat dadakan, belum terprogram secara berkelanjutan, dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil kelompok perempuan dalam hal penguatan kapasitas, akses pasar, maupun pendampingan usaha.”(Wawancara 3 Maret 2025)

Berdasarkan pernyataan di atas dalam hal penguatan kapasitas, akses pasar, dan pendampingan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi fasilitatif pemerintah kalurahan sebagai pemampu dan pendukung inisiatif masyarakat masih lemah dan belum diarahkan pada proses pemberdayaan yang mendalam. pemerintah kalurahan juga belum sepenuhnya menjalankan peran kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor lokal secara aktif, seperti Pokdarwis dan kelompok perempuan pelaku ekonomi kreatif. Tata kelola yang terjadi cenderung bersifat top-down dan administratif, belum mengarah pada kemitraan yang sejajar dan partisipatif.

Secara konkret untuk menganalisis pemberdayaan perempuan maka yang perlu ditinjau adalah program dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kalurahan, hal ini disampaikan oleh Sumijo selaku Carik;

”tentunya yaitu melalui pelatihan-pelatihan dan penganggaran kami yang di tingkat Kelurahan Ini untuk apa sering melakukan kegiatan-kegiatan Meskipun mereka itu sudah melaksanakan tapi kan perlunya ada inovasi dari apa yang menjadi Keinginan mereka misalkan termasuk olahan sederhananya nah Ketika itu sering melaksanakan kegiatan dan itu akan apa ya menjadikan inovasi

menjadi lebih kreatif entah itu pengemasan Kemudian dari segi rasa dan tentunya kan penting untuk makanan merencanakan pelatihan tersebut." (Wawancara, 27 Februari 2025)

Dari pernyataan di atas menunjukan bahwa pemerintah kalurahan telah menjalankan fungsi fasilitasi melalui pelatihan dan penganggaran bagi kelompok perempuan sebagai pelaku ekonomi. Dalam konteks ekonomi kreatif, keberlanjutan inovasi merupakan aspek yang sangat pemting atau menjadi kunci paling fundamental. Namun dalam pernyataan di atas pemerintah Kalurahan belum optimal sebagai katasilitator pertumbuhan ekonomi di tingkat Kalurahan, karena sifat pemerintahan kalurahan yang masih reaktif.

Sebagai suatu institusi pemerintah kalurahan bertanggung jawab membuat regulasi, mengelola aset desa, melakukan manajemen sumber daya, merespon kebutuhan masyarakat, serta mampu membangun relasi dengan pihak luar dalam mengembangkan sumber daya yang ada di kalurahan. Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif, maka pemerintah kalurahan harus mampu menjalin kerja sama dengan pihak-pihak ketiga dalam mengelola potensi sumber daya yang ada di kalurahan. Nah oleh karena itu, akan di jelaskan oleh Sumijo selaku Carik.

"Selama ini, kolaborasi antara pemerintah Kalurahan dengan sektor swasta memang masih terbatas. Biasanya, peran sektor swasta hanya sebatas sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerja sama yang lebih luas, termasuk dengan mahasiswa atau pihak-pihak swasta lainnya. Salah satu bentuk kolaborasi yang pernah dilakukan adalah melalui pelatihan-pelatihan yang melibatkan mereka, meskipun pelaksanaannya masih belum rutin atau terstruktur secara berkelanjutan." (Wawancara, 27 Februari 2025)

Berikut ini dokumentasi pelaksanaan workshop Sertifikasi Halal untuk UMKM yang bekerja sama dengan mahasiswa KKN di Kalurahan Wonokerto;

**Gambar 3.6**  
**Workshop Sertifikasi Halal**



*Sumber : <https://beritabaru.co/mahasiswa-kkn-sekolah-pasar-gelar-workshop-sertifikasi-halal-untuk-umkm-dan-pedagang-pasar-balerante/>. Di akses 27 juli 2025*

Dari pernyataan dan dokumentasi di atas yang menyebut bahwa kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan sektor swasta umumnya hanya sebatas menghadirkan narasumber dalam kegiatan pelatihan, menunjukkan bahwa pola fasilitasi yang dilakukan masih bersifat minimal dan belum menyentuh dimensi kemitraan yang strategis. Dalam konteks penguatan ekonomi kreatif melalui kelompok perempuan, kondisi ini menjadi indikasi bahwa pemerintah kalurahan belum secara optimal memanfaatkan potensi kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keterlibatan sektor swasta, yang semestinya dapat menyediakan dukungan teknologi, akses pasar, hingga modal usaha, masih belum digarap sebagai bagian integral dari kebijakan fasilitatif pemerintah Kalurahan.

Lebih lanjut di jelaskan pula bagaimana pemerintah kalurahan dalam bekerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya penguatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif, di sampaikan oleh Riyanto Sulistiyo Budi selaku Lurah Wonokerto;

”Pertama mereka ada peningkatan kualitas yang mungkin di luar mereka inginkan, mencontoh kegiatan-kegiatan Yang ekonominya sudah berjalan tentunya mungkin dari kelompok-kelompok Tani, Kita pernah melakukan penguatan kapasitas studi banding ke kelompok lain, ke luar wilayah, kemudian mereka mencontoh kegiatan-kegiatan itu yang secara kasat mata mereka lakukan, terus dari Kelurahan mengadakan penguatan kapasitas SDM, kita secara rutin setiap tahun kadang satu kali dan dua kali kita kumpulkan kita tingkatkan SDM SDM mereka dengan kita mengundang narasumber narasumber yang sudah berpengalaman baik dari pelaku usaha ataupun dari akademisi dan tentunya permocalan kita juga carikan, baik dari dari dana desa maupun dari sumber dana-dana lainnya” (Wawancara, 27 Februari 2025)

Hal serupa juga di sampaikan oleh Agus Hardono selaku staf kamitwu

”Peningkatan kapasitas ada sendiri dan jenis pelatihan ada juga, ada pelatihan khusus desa dan ada pelatihan dari tingkat kecamatan itu sendiri. adapun jenis pelatiannya seperti membatik, batik simbori, dan khusus batik wonokerto juga ada yang sudah eksis. Kalau intensitasnya itu tergantung dari anggaran yang ada, dan untuk pertemuannya satu bulan sekali dengan pengurus-penurus seperti pengurus desaprima, semisalnya mau mengadakan produk dan membuat pameran diluar. Dalam pelatihan dilaksanakan 2-3 kali setahun.” (Wawancara, 3 April 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki program peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk masyarakat desa, khususnya untuk pengembangan ekonomi kreatif. Program-program tersebut meliputi pelatihan khusus desa dan pelatihan dari tingkat kecamatan, seperti membatik, batik simbori, dan batik wonokerto. Intensitas pelatihan tergantung pada anggaran yang ada, dan pertemuan dengan pengurus desa dilakukan secara

teratur untuk membahas rencana dan kegiatan. Pemerintah desa memiliki komitmen untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa melalui program-program pelatihan, yang dilaksanakan 2-3 kali setahun. Namun jika dilihat dari intensitas pelatihan, maka dapat dimaknai bahwasannya hal ini belum menjadi prioritas utama penyelenggaraan pemerintah Kalurahan.

Selanjutnya pernyataan diatas juga mencerminkan bahwa pelatihan yang dilakukan masih bersifat insidental dan belum diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, khususnya bagi kelompok perempuan. Padahal, kelompok perempuan membutuhkan dukungan yang lebih dari sekadar pelatihan sesaat mereka memerlukan pendampingan jangka panjang, penguatan kapasitas produksi, hingga pengembangan jejaring usaha.

Tentunya dalam menunjang keberlanjutan pemberdayaan ekonomi maka perlu ditingkatkan intensitas program dan kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah Kalurahan, hal ini disampaikan oleh Siti Selaku ketua Desa Prima:

”Dalam perkembangan ekonomi kreatif, Disini cukup mendukung dalam bentuk program, dalam hal dukungan anggaran seperti Pameran dan Expo/Bazar, kalau yang expo khusus wonokerto setahun sekali, akan tetapi event yang lain tidak bisa diprediksi karena kadang-kadang itu ada event di lembaga lain kemudian kita dilibatkan itu. kan kita nggak masuk ke program. gitu Jadi itu program dadakan jadi satu tahun itu saya pameran hampir setiap bulan entah itu dari Kelurahan, kapanewon, kabupaten sampai provinsi.” (18 Maret 2025)

Berikut ini dokumentasi pelaksanaan bazar di Kalurahan Wonokerto;

**Gambar 3.7**  
**Pelaksanaan Bazar hasil Ekonomi Kreatif**



*Sumber : website Sidewo*

Dari ulasan dan gambar di atas, dukungan pemerintah kalurahan sudah cukup dirasakan yakni keikutsertaan dalam pameran dan Expo/Bazar. Namun, dukungan tersebut tampak belum berbasis pada perencanaan program yang terstruktur, karena sebagian besar kegiatan bersifat dadakan, tergantung undangan dari lembaga lain. Jika di kontekskan pada sudut pandang ekonomi kreatif, ketidak aturan program membuat perencanaan produksi dan inovasi menjadi kurang optimal. Lebih lanjut disampaikan juga oleh Ismiati selaku masyarakat;

"Pelatihan-pelatihan yang kami fasilitasi di Kalurahan dimulai, misalnya, dari pelatihan olahan makanan. Setelah pelatihan olahan, dilanjutkan dengan tahapan berikutnya seperti pelatihan pengemasan, pelabelan produk, hingga pemasaran melalui digital marketing. Selain itu, kami juga memfasilitasi proses perizinan usaha, termasuk NIB, sertifikasi halal, dan lainnya. Semua itu bisa difasilitasi oleh Kalurahan. Hanya saja, dalam satu program biasanya kuota peserta terbatas, sekitar 20 hingga 25 orang. Jadi, dalam satu tahun kadang hanya satu kali pelatihan dengan jumlah peserta yang terbatas. Namun, program seperti ini tetap

berkelanjutan dan diupayakan ada setiap tahun. Selain program yang berasal dari anggaran Kalurahan, kami juga sering mendapat dukungan dari berbagai dinas terkait. Misalnya, pelatihan digital marketing bisa difasilitasi oleh Dinas Koperasi pada bulan Februari, dan kemudian di bulan Agustus mungkin datang dari dinas lain seperti Dinas Pertanian atau bahkan melalui program dari Raperda. Jadi, dalam satu tahun kami bisa saja menerima pelatihan serupa dari dua instansi berbeda. Namun, jumlah pelatihan per tahun tidak selalu pasti karena sangat bergantung pada bantuan dari dinas-dinas tersebut. Untuk program seperti sertifikasi halal, bahkan pernah terjadi kami kekurangan peserta, karena sebagian besar pelaku usaha di Wonokerto kemungkinan besar sudah tersertifikasi, atau mereka belum mengetahui informasi pendaftarannya secara luas." (Wawancara 18 Maret 2025)

Berikut ini dokumentasi kegiatan pelatihan pengemasan olahan hasil pertanian PUPM kalurahan konokerto;

**Gambar 3.8**  
**Pelatihan Pengemasan pelaku UMKM**



Sumber : <https://dikemas.com/pelatihan-pengemasan-olahan-hasil-pertanian-pupm-kalurahan-wonokerto-turi-sleman>. Diakses 22 juni 2025

Berdasarkan pernyataan dan gambar di atas, fasilitasi pemerintah kalurahan sudah mencakup berbagai aspek seperti pelatihan produksi, pengemasan, digital

marketing, hingga perizinan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih bergantung pada dukungan dari instansi eksternal. Ketidakpastian waktu dan jumlah pelatihan yang masih terbatas mencerminkan belum adanya perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam proses pemberdayaan perempuan, keterlibatan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan ditingkat kalurahan merupakan salah satu aspek penting, untuk menelaahnya telah di jelaskan oleh selaku Riyanto Sulistiyo Budi Lurah:

”ketika kami melaksanakan kegiatan musyawarah Kelurahan kami pasti melibatkan dari berapa persen itu dari wanita pasti kita mengundang dari PKK mengundang dari karang taruna kemudian mengundang dari UMKM pelaku dari usaha-usaha tersebut artinya wanita itu pasti kami libatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat kalurahan.”

(Wawancara 27 Februari 2025)

Dokumentasi keterlibatan perempuan dalam Muskal tahun 2025

**Gambar 3.9**  
**Keterlibatan Perempuan dalam Muskal**



*Sumber : Webiste "Sidewo" Kalurahan Wonokerto*

Dari pernyataan dan dokumentasi diatas pemerintah kalurahan telah melibatkan kelompok perempuan dalam proses pengambilan keputusan,

pelibatan unsur PKK, pelaku UMKM, dan kelompok perempuan lainnya menunjukkan kesadaran akan pentingnya suara perempuan dalam perencanaan program. Namun, keterlibatan perempuan masih bersifat formalitas, karena tidak di berdayakan secara kapasitas dan ruang bicara yang setara dalam forum pengambilan keputusan. Hal ini juga di jelaskan lebih lanjut oleh Yati selaku PKK:

"Kuota keterwakilan perempuan dalam berbagai forum di tingkat Kalurahan, seperti Musyawarah Kalurahan (Muskal) dan Musrenbang, tetap ada dan selalu dipenuhi. Misalnya, dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), terdapat anggota perempuan sebagai bentuk keterwakilan gender. Oleh karena itu, dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan, perempuan tetap dilibatkan secara aktif sesuai peran dan kapasitasnya." (Wawancara 3 Maret 2025)

Pernyataan di atas mencerminkan adanya komitmen dari pemerintah kalurahan dalam melibatkan perempuan, secara konseptual, hal ini merupakan bentuk fasilitasi awal terhadap pemberdayaan perempuan yaitu membuka terhadap ruang pengambilan keputusan, namun dalam konteks penguatan ekonomi kreatif perlu adanya penguatan kapasitas perempuan agar keterlibatannya tidak secara simbolis melainkan bersifat substansial. Dalam menindaklanjuti proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan maka akan ditelaah bagaimana persepsi masyarakat dan dampak pemberdayaan perempuan di Kalurahan Wonokerto. Dalam hal ini akan di sampaikan oleh Kuswindiarti selaku pelaku UMKM:

meningkatkan ekonomi. Untuk UMKM sendiri sering ada pameran dan mendisplay produknya yang ada setiap kunjungan. Dan untuk KWT juga sudah cukup lumayan sering terjadi pembinaan dan pelatihan.

(Wawancara 3 Maret 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan, khususnya melalui UMKM dan Kelompok Wanita Tani (KWT), telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi lokal. Kegiatan seperti pameran dan display produk memberi ruang bagi perempuan untuk mempromosikan hasil usahanya, sementara pelatihan dan pembinaan yang rutin memperkuat kapasitas produksi dan manajerial mereka. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi sudah menyentuh aspek praktis yang mendukung kemandirian ekonomi perempuan dan memperluas akses mereka terhadap pasar serta pengetahuan baru dalam kegiatan ekonomi kreatif. Lebih lanjut dijelaskan juga oleh pak Tarjo selaku BPKal:

”Yah sudah cukup relatif, karena sebagian bagus dan sebagiannya kurang. Karena kurangnya komunikasi dan informasi masyarakat, sehingga tidak tau permasalahan apa yang ada dikalurahan wonokerto.” (Wawanara 3 Maret 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah kalurahan masih bersifat relatif. Hal ini berimplikasi pada rendahnya pemahaman warga terhadap program, kebijakan, atau persoalan yang sedang dihadapi kalurahan, sehingga menimbulkan kesenjangan persepsi. Dalam konteks pemberdayaan, khususnya penguatan ekonomi kreatif perempuan, kondisi ini menjadi hambatan karena partisipasi aktif masyarakat sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan komunikasi dua arah yang efektif.

Pemerintah Kalurahan perlu mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial bagi pelaku ekonomi kreatif agar dapat menunjang keberlanjutan dari aktivitas ekonomi ini, hal ini agar dapat memudahkan pelaku ekonomi kreatif dalam beradaptasi terhadap kemajuan zaman. Oleh karena itu akan di jelaskan oleh Riyanto Sulistiyo Budi selaku Lurah Wonokerto;

"Dalam upaya mempromosikan produk ekonomi kreatif, salah satu langkah yang kami lakukan adalah menggandeng mahasiswa, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Mahasiswa membantu dari sisi teknis, seperti pemasangan dan pengelolaan media digital. Salah satu terobosan yang kami dorong adalah pemanfaatan media sosial, seperti Instagram, WhatsApp, dan website, karena platform-platform ini kini sangat mudah diakses oleh masyarakat. Beberapa pelaku ekonomi kreatif bahkan sudah memiliki website sendiri dan mengelolanya secara mandiri. Selain itu, kami juga memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai wadah untuk mengintegrasikan informasi tentang produk-produk lokal. Melalui website desa, kami menyatukan data dan informasi terkait produk ekonomi kreatif agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat maupun pihak luar." (Wawancara, 27 Februari 2025)

Berikut keberadaan sistem informasi desa di Kalurahan Wonokerto

**Gambar 3.10**

**Website Sistem Informasi Desa Kalurahan Wonokertro (SIDEWO)**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, (2025)

berdasarkan pernyataan dokumentasi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan telah mengambil langkah progresif dalam mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana promosi produk ekonomi kreatif. Keterlibatan mahasiswa dalam aspek teknis seperti pemasangan dan pengelolaan media digital menjadi bentuk kolaborasi yang positif dalam menjembatani kesenjangan kapasitas teknologi di tingkat desa. Keberadaan Sistem Informasi Desa (SID) juga menjadi kanal formal yang digunakan untuk mengintegrasikan data dan informasi produk-produk lokal secara terpusat. Akan tetapi dari hasil observasi peneliti, keberadaan Website tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat promosi dan pemasaran produk-produk ekonomi kreatif di Kalurahan Wonokerto.

Dalam konteks fasilitasi pemerintah kalurahan terhadap kelompok perempuan pelaku ekonomi kreatif, langkah ini penting namun masih perlu diperkuat. Digitalisasi dapat menjadi alat pemberdayaan strategis bagi perempuan. Oleh karena itu, peran fasilitasi pemerintah kalurahan tidak cukup hanya menyediakan media promosi, tetapi juga harus mencakup pelatihan dan pendampingan intensif agar kelompok perempuan mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi secara mandiri.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat dikatakan bahwasannya program dan pemberdayaan perempuan di Kalurahan Wonokerto dalam upaya mendukung penguatan ekonomi kreatif telah mendapat perhatian melalui keterlibatan dalam proses musyawarah dan pelibatan dalam akses program pemberdayaan. Akan tetapi banyak kegiatan yang dilakukan belum melalui perencanaan yang matang

dan sistematis. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan memang sudah dibuka, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh penguatan kapasitas yang memadai.

### **C. Dinamika dan Tantangan Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Ekonomi Kreatif.**

Pemerintah Kalurahan berperan strategis sebagai fasilitator utama dalam pembangunan berbasis potensi lokal, begitupula dalam melaksanakan penguatan ekonomi kreatif ditingkat kalurahan. Dinamika pelaksanaan fasilitasi tidak terlepas dari pengaruh oleh kondisi struktural dan kultural yang berada di Kalurahan. Dukungan anggaran, kapasitas pemerintah desa, kolaborasi dengan berbagai pihak (sektor swasta) akan menjadi faktor pendukung dan menentukan keberhasilan program.

Adapun analisis yang dilakukan pada pembahasan ini berupaya mengesplor tentang bagaimana pemerintah kalurahan dapat mengoptimalkan perannya dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai pilar pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dinamika dan tantangan Pemerintah Kalurahan dalam penguatan ekonomi kreatif dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. Berikut ini dijelaskan oleh Sumijo selaku carik:

"Sumber daya manusia dan pola pikir menjadi faktor penting dalam mendukung penguatan ekonomi kreatif. Uang memang bukan segalanya, tetapi tanpa dukungan nyata dari pemerintah terhadap kegiatan UMKM, ekonomi kreatif, dan kelompok perempuan, maka pengembangan sektor tersebut tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, keberhasilan fasilitasi sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat secara luas." (Wawancara 27 Februari 2025)

Berdasarkan pernyataan di atas bahwasannya dalam melakukan penguatan ekonomi kreatif masih sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan komitmen pemerintah sebagai fasilitator utama. Sehingga kolaborasi menjadi aspek penting, karena keberhasilan suatu program pemberdayaan adalah terwujudnya sinergi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan masyarakat, khususnya kelompok perempuan. Rendahnya kualitas SDM serta terbatasnya akses terhadap pelatihan dan pendampingan juga menjadi faktor penghambat utama. Lebih lanjut dijelaskan juga oleh Siti sebagai ketua Desa Prima;

”Tantangan utama dalam pengembangan UMKM terletak pada karakter pelaku usahanya. Tidak semua pelaku bersedia mengubah pola pikir, terutama terkait pentingnya kemasan dan kualitas produk. Banyak yang merasa produknya sudah cukup baik tanpa perlu perbaikan kemasan, padahal kemasan yang menarik dan berkualitas sangat penting untuk menembus pasar yang lebih luas, seperti pameran, toko oleh-oleh, hingga ekspor antardaerah. Selain itu, sekitar 30–40% anggota forum masih enggan mengurus legalitas, kemasan, atau digital marketing karena keterbatasan kemampuan dan minat. Untuk mengatasi hal ini, disarankan agar pelatihan difokuskan pada tenaga pemasaran, bukan pelaku usaha langsung, agar pelaku UMKM tetap fokus pada produksi dan tercipta manajemen yang lebih efisien. Sebab, jika semua proses dikerjakan sendiri, hasilnya menjadi tidak optimal.” (Wawancara 18 Maret 2025)

Dari pernyataan di atas yang menjadi salah satu hambatan utama adalah pola pikir pelaku usaha yang cenderung masih berlum berubah, terutama kesadaran akan pentingnya kemasan, legalitas, dan pemesaran secara online (digital). Sehingga hal itu dapat dimaknai bahwasannya tantangan yang di hadapi adalah secara struktural dan kultural. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan dapat menerapkan prinsip fasilitasi yang lebih efektif, artinya pemerintah kalurahan tidak hanya menyediakan pelatihan, tetapi juga merancang ekosistem

pendukung yang berpotensi meningkatkan keberlanjutan, efisiensi kerja, dan peningkatan daya saing produk lokal. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah yang disampaikan oleh Agus Hardono selaku staf kamitudo:

"Kelompok-kelompok yang telah terbentuk berperan dalam mengembangkan potensi wilayah masing-masing. Salah satu contohnya adalah peran UMKM dalam mendukung kegiatan pariwisata. Sektor pariwisata menjadi ruang kolaborasi yang baik karena melibatkan berbagai kebutuhan, seperti konsumsi bagi wisatawan. Kebutuhan ini kemudian diakomodasi oleh UMKM, termasuk melalui kerja sama dengan Pokdarwis dalam menyediakan makanan dan minuman. Selain itu, UMKM juga berperan dalam penyediaan suvenir dan oleh-oleh khas daerah, seperti kopi Merapi, yang turut memperkuat identitas lokal dan meningkatkan nilai ekonomi dari sektor pariwisata." (Wawancara 3 Maret 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana sinergi antara kelompok masyarakat, UMKM, dan sektor pariwisata menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Dalam konteks ekonomi kreatif, kegiatan seperti penyediaan konsumsi bagi wisatawan, produksi suvenir, dan pemasaran oleh-oleh khas seperti, Kopi Merapi merupakan bentuk pemanfaatan kreativitas, budaya, dan potensi lokal sebagai nilai tambah ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaku aktif dalam menciptakan produk dan layanan bernilai ekonomi. peran pemerintah atau lembaga desa sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan kelompok-kelompok seperti Pokdarwis dan UMKM agar mampu merespons peluang ekonomi yang muncul dari sektor pariwisata. dalam tahap ini penting juga bagi pemerintah kalurahan untuk berkolaborasi dengan sektor swasta

ataupun lembaga lainnya dalam mempercepat penguatan ekonomi kreatif, hal ini di sampaikan oleh Riyanto Sulistiyo Budi selaku Lurah:

”Kami belum sepenuhnya menjalin kerja sama dengan sektor swasta dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, terdapat satu bentuk kolaborasi yang telah terjalin, yaitu kerja sama dengan CV Mitraperindo (Mading Press) dalam rangka meningkatkan hasil perekonomian masyarakat melalui ekspor komoditas salak. Sementara itu, untuk sektor swasta lainnya, hingga saat ini belum ada kerja sama yang dilakukan.” (Wawancara 27 Februari 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi oleh pemerintah kalurahan dalam menjalin kemitraan dengan sektor swasta masih bersifat terbatas dan belum menyentuh secara luas bidang ekonomi kreatif. Meskipun ada satu contoh kerja sama ekspor salak dengan CV Mitraperindo, bentuk fasilitasi ini lebih bersifat sektoral (pertanian) dan belum menyentuh aspek-aspek kreatif seperti pengolahan produk, pengemasan, pemasaran digital, atau inovasi turunan dari produk lokal.

Dari perspektif ekonomi kreatif, kerja sama dengan sektor swasta seharusnya tidak hanya difokuskan pada komoditas ekspor primer, tetapi juga diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui kolaborasi dalam bidang industri kreatif lokal seperti kerajinan, kuliner, desain produk, hingga promosi digital.

Selain kemitraan dalam melakukan penguatan ekonomi kreatif maka penting juga untuk menyediakan prasarana yang menunjang pengembangan ekonomi kreatif, hal ini dijelaskan oleh Siti selaku ketua desa Prima:

”Tentu masih ada beberapa hal yang dirasa kurang dalam hal dukungan, khususnya terkait penyediaan galeri untuk memamerkan dan memasarkan produk-produk UMKM. Kami sangat berharap pemerintah kalurahan dapat merealisasikan fasilitas tersebut, karena

hingga saat ini belum terlaksana akibat keterbatasan anggaran yang cukup besar. Sementara itu, dukungan dalam bentuk lainnya, seperti sarana dan prasarana dasar, sudah cukup baik dan membantu kelancaran kegiatan UMKM yang ada.” (Wawancara 18 Maret 2025)

Berdasarkan uraian di atas pelaku ekonomi kreatif di Kalurahan Wonokerto membutuhkan sarana yang lebih representatif, khususnya galeri sebagai ruang etalase dan pemasaran produk lokal. galeri atau ruang display merupakan infrastruktur penting yang mendukung peningkatan nilai jual produk, serta memperluas jangkauan pasar, baik secara fisik maupun digital. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dukungan pemerintah kalurahan masih terbatas pada aspek yang bersifat umum atau teknis, belum menyentuh kebutuhan strategis yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi kreatif. Lebih lanjut akan dijelaskan bagaimana kebijakan anggaran pemerintah kalurahan, yang akan disampaikan oleh Sumijo selaku carik

”Terkait dengan pelaksanaan program, pemerintah kalurahan selalu merujuk pada dokumen RPJM Kalurahan sebagai acuan utama. Namun, apabila terdapat usulan tambahan dari masyarakat, hal tersebut akan ditampung melalui musyawarah dusun (musdus) sebagai bagian dari penjaringan aspirasi. Aspirasi yang dihimpun kemudian dituangkan dalam rencana kerja tahun berjalan atau tahun berikutnya, sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran kalurahan.” (Wawancara 27 Februari 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa kebijakan anggaran pemerintah kalurahan dalam mendukung program ekonomi kreatif bersifat prosedural dan berbasis pada dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMKalurahan). Pola ini juga mengindikasikan bahwa pengembangan ekonomi kreatif masih sangat tergantung pada proses aspiratif tahunan, bukan merupakan program strategis yang dirancang secara khusus dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi

kreatif, seharusnya terdapat visi jangka panjang dan keberpihakan anggaran yang konsisten untuk mendukung inovasi, pelatihan, pemasaran, serta infrastruktur pendukung UMKM.

Tentunya dalam pelaksanaannya terdapat hambatan utama yang dihadapi pemerintah Kalurahan dalam mengoptimalkan fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif, yang dijelaskan oleh Riyanto Sulistiyo Budi Selaku Lurah:

”Yang Pertama, mereka bisa membuat tapi tidak bisa memasarkan, yang kedua dukungan dari stakeholder atau pemerintah yang diatasnya berkaitan, marketing juga. sebenarnya untuk peningkatan mereka untuk edukasi untuk membantu itu mudah, tapi setelah ada hasilnya mau ke mana toh hasilnya ini ya itu yang biasanya itu nanti kita bisa membuat tapi tidak bisa menjual. Yang ketiga untuk memulai suatu kegiatan itu kita harus menemukan rasa kepercayaan diri mereka. itu yang paling sulit itu bagi peningkatan ekonomi itu. Jadi mereka itu kalau dikasih gambaran kita meningkatkan ekonomi di bagian apa yang ada kreasinya atau apa itu biasanya laku, kan kebanyakan memulai usaha itu biasanya sing agak kita Berikan pemahaman edukasi makanya kita agak kesulitan sendiri kadang di situ.” (Wawancara 27 februari 2025)

Pernyataan tersebut mengungkap tiga persoalan utama dalam pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat, khususnya kelompok perempuan di tingkat Kalurahan, yaitu: kendala pemasaran produk, minimnya dukungan lintas stakeholder, dan rendahnya kepercayaan diri pelaku usaha. Ketiga aspek ini mencerminkan bahwa fasilitasi yang dilakukan selama ini masih lebih berfokus pada aspek produksi (membuat produk). Namun belum menyentuh secara serius rantai nilai berikutnya seperti distribusi, branding, dan keberlanjutan usaha. Disisi lain menunjukkan bahwa pelaku ekonomi lokal masih belum sepenuhnya siap secara mental maupun strategis untuk memasuki pasar secara optimal. Oleh

karena itu, fasilitasi oleh pemerintah Kalurahan perlu diperluas. Lebih lanjut disampaikan oleh Sumijo selaku Carik

"kami sudah melaksanakan kegiatan namun dari konsisten dari peserta Itu karena dari awalnya menggebu-gebu untuk melaksanakan kegiatan tersebut namun ketika di perjalanan atau ketika sedang melaksanakan apa perhatian tahu bahwa tidak seindah yang dibayangkan ketika pelatihan mendapatkan hasil yang maksimal yaitu yang menjadi permasalahan kami atau sebagai hambatan kami dalam melaksanakan suatu kegiatan yaitu keberhasilan itu dalam 10 orang satu yang melaksanakan kami sudah menganggap berhasil melaksanakan kami ada harapan 100% tetapi tidak mungkin kalau 100% kemudian dari segi penganggaran tidak ada kendala, program juga tidak ada masalah dari terkait dengan pelatihnya juga tidak masalah. upayanya untuk mengatasi ini kita Selalu untuk mengkomunikasikan Kenapa tidak melaksanakan adanya mengevaluasi dari kegiatan itu, kita undang kembali Kenapa kok kemarin tidak dilaksanakan dan tidak melakukan dari apa yang menjadi keinginan dari pelatihan itu sendiri." (Wawancara 27 Februari 2025)

Pernyataan di atas mencerminkan tantangan klasik dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu ketidaksesuaian antara antusiasme awal peserta dan konsistensi dalam pelaksanaan pasca-pelatihan. Antusiasme tinggi di awal sering kali menurun ketika peserta menghadapi kenyataan bahwa mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan dalam praktik ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dalam konteks fasilitasi pemerintah kalurahan, hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang bersifat teknis (pelatihan, anggaran, pelatih) belum cukup untuk memastikan keberlanjutan dan dampak nyata.

Dari sisi pendekatan fasilitasi, penting untuk tidak hanya fokus pada penyediaan pelatihan, tapi juga membangun sistem pendampingan dan evaluasi pasca-kegiatan. Upaya seperti mengundang peserta kembali dan mengevaluasi alasan ketidakterlibatan merupakan langkah awal yang positif, namun harus

dibarengi dengan strategi jangka panjang seperti mentoring, role model lokal, serta dukungan psikososial agar peserta memiliki daya tahan, motivasi, dan kepercayaan diri. Dalam kerangka ekonomi kreatif, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga oleh kapasitas untuk beradaptasi, berinovasi, dan bertahan di tengah tantangan dimensi yang perlu difasilitasi secara lebih sistematis oleh pemerintah Kalurahan.

Dari seluruh uraian di atas maka dapat dikatakan Dinamika dan tantangan fasilitasi pemerintah kalurahan dalam penguatan ekonomi kreatif menunjukkan adanya ketimpangan antara peran ideal sebagai fasilitator pemerintahan yang partisipatif dan kenyataan di lapangan yang masih terbatas secara struktural, kultural, dan strategis. Dalam konteks pemerintahan desa, fasilitasi seharusnya tidak hanya bersifat administratif dan prosedural, tetapi juga mampu membangun ekosistem kolaboratif yang mendorong inovasi dan keberlanjutan ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan pola pikir, minimnya dukungan lintas sektor, serta lemahnya infrastruktur pendukung menjadi penghambat utama. Ekonomi kreatif yang berbasis potensi lokal menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga pada pendampingan, pembangunan jejaring pemasaran, serta pembentukan kelembagaan sosial yang mampu menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti pelaku UMKM dan perempuan.

Penelitian ini menemukan bahwa fasilitasi pemerintah kalurahan wonokerto dalam penguatan ekonomi kreatif melalui kelompok perempuan telah dilakukan melalui pelatihan, bantuan sarana, serta partisipasi dalam pameran. Namun, fasilitasi tersebut belum berbasis perencanaan strategis dan cenderung reaktif terhadap aspirasi masyarakat. Hambatan utama terletak pada kurangnya konsistensi peserta pasca-pelatihan, rendahnya kepercayaan diri, serta keterbatasan pemasaran. Meskipun anggaran dan dukungan kelembagaan tersedia, masih dibutuhkan pendekatan fasilitasi yang lebih integratif dan berkelanjutan untuk memperkuat peran perempuan dalam ekonomi kreatif secara mandiri.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kalurahan Wonokerto terkait “Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Perempuan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yang dirangkum dalam poin-poin berikut:

1. Pemerintah Kalurahan telah berupaya melakukan penguatan ekonomi kreatif melalui dukungan anggaran, di mana setiap tahunnya dialokasikan dana untuk mendukung kegiatan di sektor ini. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelatihan kewirausahaan, pengemasan produk, pemasaran digital, serta kolaborasi lintas sektor. Namun, upaya-upaya tersebut belum dilaksanakan secara sistematis dan strategis. Fasilitasi masih sangat bergantung pada ketersediaan program dari dinas terkait, sehingga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan lokal yang spesifik dan berkelanjutan. Akibatnya, dampak dari program yang dilaksanakan cenderung tidak merata dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha perempuan di Kalurahan.
2. Pemerintah Kalurahan Wonokerto telah memfasilitasi penguatan ekonomi kreatif melalui berbagai program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi kelompok perempuan. Fasilitasi ini mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta dukungan

promosi dan akses pasar. Namun, program yang dijalankan masih belum terstruktur secara sistematis, kurang berbasis pada pemetaan kebutuhan lokal, dan cenderung bergantung pada instansi eksternal.

3. Fasilitasi pemerintah Kalurahan dalam penguatan ekonomi kreatif menghadapi dinamika dan tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan pola pikir pelaku usaha, hingga minimnya dukungan kolaborasi lintas sektor dan infrastruktur pendukung yang memadai. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan, pemberian sarana, dan partisipasi masyarakat, pendekatan yang bersifat prosedural dan reaktif belum mampu mendorong keberlanjutan serta pengembangan ekonomi kreatif secara optimal.

## B. Saran

1. Pemerintah Kalurahan disarankan untuk menyusun kebijakan anggaran yang lebih strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penguatan ekonomi kreatif. Alokasi dana hendaknya tidak hanya bersifat tahunan dan reaktif terhadap usulan masyarakat, tetapi dirancang berdasarkan peta kebutuhan dan potensi lokal secara menyeluruh. Diperlukan integrasi antara perencanaan jangka menengah (RPJMKal) dengan program pemberdayaan ekonomi kreatif agar anggaran yang disediakan dapat digunakan secara lebih efektif dan berdampak luas. Selain itu, perlu dibuka peluang kolaborasi pendanaan dengan sektor swasta maupun lembaga lain guna memperkuat dukungan finansial dan memperluas cakupan program.

2. Pemerintah Kalurahan Wonokerto disarankan seyogyanya mengembangkan program fasilitasi penguatan ekonomi kreatif yang lebih terstruktur dan berbasis pemetaan kebutuhan serta potensi nyata di lapangan. Hal ini mencakup penyusunan rencana kerja yang jelas dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang fokus pada pemberdayaan kelompok perempuan secara menyeluruh mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga penguatan akses pasar. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan program berjalan efektif dan dapat menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga perlu didukung dengan sistem pendampingan yang berkelanjutan agar hasil pelatihan dapat diterapkan secara optimal dan mendorong kemandirian pelaku usaha.
3. Untuk menjawab tantangan dalam fasilitasi penguatan ekonomi kreatif, pemerintah Kalurahan disarankan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih transformatif dan kolaboratif. Upaya fasilitasi tidak cukup hanya bersifat prosedural dan responsif terhadap aspirasi jangka pendek, tetapi perlu dirancang secara proaktif melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek kewirausahaan, kepemimpinan komunitas, dan literasi digital. Pemerintah juga perlu membangun budaya inovasi dan kesiapan perubahan di kalangan pelaku usaha melalui program pembinaan yang berkelanjutan dan berbasis pada mentoring. Selain itu, penting untuk memperluas jejaring kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil guna menciptakan

ekosistem pendukung yang mampu menyediakan infrastruktur, pasar, serta pendampingan teknis

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriadin. (2022). Strategi Pelayanan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Di Masa Pandemi Coronavirus Disease Of 2019 (Covid-19). Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makasar
- Ali, N. (2018). Peran Ekonomi Kreatif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu (Pengrajin Anyaman Bambu). Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.
- Anggelina, R. (2022). Governabilitas Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta. Yogyakarta.
- Dendo, M.V.A. (2023) Proteksi Pemerintah Desa Terhadap Eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. . Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta. Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2021. Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta. 2 (1)N: 29-94
- Ernestivita, G. (2024). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Keterampilan Teknologi (Karang Taruna Wanita (KTW) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 146-157.

- Febian, D., Widyawati, Putra, K. A., & Sholicah , N. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Kampung Batik Tin Di Kelurahan Gundih Kota Surabaya. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmiah*, 1-17.
- Gusti Bagus Arjana. Geografi Pariwisata dan ekonomi Kreatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Haryani, T., & Kuswoyo, S. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut. *Jurnal Sosio Politico*, 3648.
- Idris, H.T. (2023) Sinergi Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata (Studi Penelitian Kualitatif di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, DIY). Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta. Yogyakarta
- Junaidi, & Pynanjung, P. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui UKM di Kota Singkawang. *SN-PKM*, 179-193.
- Laksmi, P.N. (2024) Pemberdayaan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta)). Program Studi Pembangunan Sosial STPMD "APMD" Yogyakarta. Yogyakarta

- Lede, B.B. (2023) Upaya Pemerintah Kalurahan Jerukwudel dalam Mempertahankan Kalurahan Mandiri Budaya. Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta. Yogyakarta
- Mauled Moelyono, Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan, (Rajawali Press,2010).
- Mingga, P.Y. (2023). Governing Pemerintah Desa dalam Melindungi dan Memberdayakan Petani (di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah). Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Jakarta
- Murni, S., & Rekha. (2021). Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam Peningkatan Pendapatan Pengrajin Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Industri Bordir Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie). *Journal of Students Islamic Economics and Busines*, 2535.
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Purba, T.I.G. (2023) Inovasi Peningkatan Ekonomi Kreatif melalui Pelembagaan Umkm Di Kalurahan Nglindur (Penelitian di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta). Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta. Yogyakarta.

- Rachmawati, E., Dosen, P. C., Rahman, P., & Wawan Kurniawan. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Melalui Program Gubuk Karya Sebagai Upaya Dalam Menciptakan Perempuan Mandiri Di Kelurahan Bram Itam Kiri . *Jurnal Bang Dimas*, 34-42.
- Ramadhani, H. T., & Ahdiyana, M. (2023). Implementasi Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima) Di Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman. *Journal Of Public Policy And Administration Research*, 1-13.
- Romadiyanti, T. (2020). Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung
- Setiawan, I., Luviantika, I., Dandi, & Aulia, S. (2025). Pemberdayaan Kewirausahaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam Pengembangan Inovasi Produk Makanan (Desa Cipedes, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan). *Jurnal Pengabdian Nasional Indonesia* , 85-94.
- Saputra, A. (2022). Peran Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pengrajin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung
- Seran, A.Y.W. (2022). Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM di

Padukuhan Gamplong, Kalurahan Sumber Rahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. . Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta. Yogyakarta.

Serfas, Y. M. (2023). Relasi Kekuasaan Pemerintah Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Dalam Pembahasan APBKAL 2021 (Studi di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta). Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD ”APMD” Yogyakarta. Yogyakarta.

Yafi'ah, I. C., & Yuanjaya, P. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Kreatif BatikTulis Giriloyo . *Journal of Public Policy and Administration Research*, 1-13.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGUATAN**  
**EKONOMI KREATIF MELALUI KELOMPOK PEREMPUAN DI**  
**KAKLURAHAN WONOKERTO KAPENEWON TURI KABUPATEN**  
**SLEMAN**

Nama Informan : .....

Jabatan/Pekerjaan : .....

Tingkat Pendidikan : .....

Jenis Kelamin : .....

Tanggal Wawancara : .....

---

**Daftar Pertanyaan**

**A. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam penguatan ekonomi kreatif**

- 1) Bagaimana kebijakan pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kalurahan Wonokerto?
- 2) Apa saja program atau inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif?
- 3) Sejauh mana pemerintah Kalurahan Wonokerto berkolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan ekonomi kreatif?
- 4) Apa peran lembaga-lembaga lokal atau komunitas kreatif dalam mendukung kebijakan pemerintah Kalurahan Wonokerto terkait ekonomi kreatif?
- 5) Bagaimana dampak kebijakan pemerintah Kalurahan Wonokerto terhadap pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di wilayah tersebut?
- 6) Apa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif?

- 7) Bagaimana pemerintah Kalurahan Wonokerto melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif?
- 8) Apa jenis pelatihan atau program peningkatan kapasitas yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto untuk para pelaku ekonomi kreatif?
- 9) Sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial didorong oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam mempromosikan produk ekonomi kreatif?
- 10) Bagaimana pemerintah Kalurahan Wonokerto mengukur keberhasilan atau dampak dari kebijakan yang diterapkan dalam mendukung ekonomi kreatif?

#### **B. Pemberdayaan Perempuan di Kalurahan Wonokerto**

- 1) Bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam pemberdayaan perempuan?
- 2) Apa saja program atau kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan?
- 3) Sejauh mana perempuan di Kalurahan Wonokerto terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat kalurahan?
- 4) Bagaimana dampak pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan di Kalurahan Wonokerto, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan keluarga?
- 5) Apa tantangan utama yang dihadapi perempuan di Kalurahan Wonokerto dalam mencapai pemberdayaan sosial, ekonomi, dan politik?
- 6) Bagaimana program pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto berkontribusi pada pemberdayaan perempuan?
- 7) Apa peran organisasi masyarakat atau kelompok perempuan dalam mendukung pemberdayaan perempuan di Kalurahan Wonokerto?

- 8) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan di Kalurahan Wonokerto, dan apakah ada perubahan sikap terhadap peran perempuan dalam masyarakat?
- 9) Sejauh mana perempuan di Kalurahan Wonokerto memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan hak-hak sosial lainnya?
- 10) Apa dampak pemberdayaan perempuan di Kalurahan Wonokerto terhadap pemberdayaan generasi muda dan peran perempuan dalam pembangunan komunitas?

**C. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat fasilitasi Pemerintah Kalurahan guna penguatan ekonomi kreatif**

- 1) Apa saja faktor yang mendukung fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam penguatan ekonomi kreatif?
- 2) Bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung upaya pemerintah Kalurahan dalam penguatan ekonomi kreatif?
- 3) Sejauh mana kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan dengan sektor swasta atau lembaga lain mempercepat penguatan ekonomi kreatif?
- 4) Apa peran infrastruktur dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif?
- 5) Bagaimana kebijakan anggaran Pemerintah Kalurahan dalam mendukung program-program ekonomi kreatif?
- 6) Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kalurahan dalam mengatasi kendala dalam fasilitasi ekonomi kreatif?
- 7) Bagaimana kemampuan sumber daya manusia di Pemerintah Kalurahan dalam mendukung penguatan ekonomi kreatif?
- 8) Apa peran teknologi dan digitalisasi dalam mendukung fasilitasi pemerintah Kalurahan untuk pengembangan ekonomi kreatif?
- 9) Bagaimana faktor budaya dan tradisi lokal mempengaruhi dukungan pemerintah Kalurahan terhadap ekonomi kreatif di wilayah tersebut?

10) Apa hambatan utama yang dihadapi Pemerintah Kalurahan dalam mengoptimalkan fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

## **DOKUMENTASI INFORMAN**



Foto : Wawancara Lurah



Dok: Wawancara Carik



Dok : Wawancara Staf Kamitudo



Dok : Wawancara Tokoh Masyarakat



Dok : Wawancara PKK



Dok : Wawancara BPKal



Dok : Wawancara Pokdarwis



Dok : Wawancara Desa Prima



Dok: Wawancara Pelaku UMKM



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

Alamat : Jl. Tambo No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 148/I/U/2025

**Hal : Permohonan ijin penelitian**

Kepada Yth:

Lurah Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Eyling Delfia Samaloisa

No Mhs : 21520016

**Program Studi : Ilmu Pemerintahan**

#### Judul Skripsi

#### Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Ekonomi Kreatif melalui

Kelompok Perempuan

**Tempat** : Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

Dosen Pembimbing : Utami Sulistiana, S.P., M.P

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Februari 2025

Ketua





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI DILAKUKAN PADA KONSEP KONSEP TERBUKA  
• PROGRAM STUDI DILAKUKAN PADA KONSEP KONSEP TERBUKA  
• PROGRAM STUDI DILAKUKAN PADA KONSEP KONSEP TERBUKA  
• PROGRAM STUDI DILAKUKAN PADA KONSEP KONSEP TERBUKA

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 76/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Eyling Delfia Samaloisa  
Nomor Mahasiswa : 21520016  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman  
b. Sasaran : Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Perempuan  
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

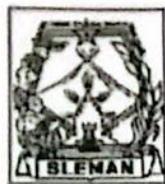
Yogyakarta, 17 Februari 2025  
Ketua  
  
Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NIY. 170 230 190

**PERHATIAN :**

Setelah selesai melaksanakan penelitian,  
mohon surat tugas ini diserahkan kepada  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat  
Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat  
Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa  
tersebut telah melaksanakan penelitian.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KAPANEWON TURI  
PEMERINTAH KALURAHAN WONOKERTO  
କାଳୁରାହା ଓନୋକେର୍ତ୍ତୋ

Imorejo, Wonokerto, Turi, Sleman, 55551  
Telepon (0274) 7495721 Laman: sidewo.id, Surel: ds.wonokerto@gmail.com •

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
**NO: 05/WNK/I/2025**

**LURAH WONOKERTO**

**Dasar**

- : 1. Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian , Izin Kuliah Kerja Nyata Dan Izin Praktik Lapangan
2. Surat Permohonan Ijin Penelitian Nomor : 148/I/U/2025

**MENGIZINKAN**

Kepada :

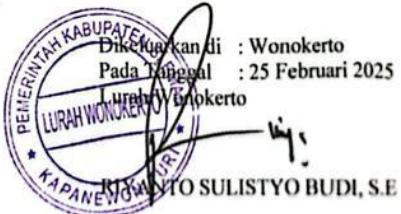
Nama : EYLING DELFIA SAMALOISA  
NIM : 21520016  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Universitas : STP APMD Yogyakarta  
Judul Penelitian : Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Perempuan  
Lokasi : Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta  
Waktu Penelitian : Februari 2025  
Dosen Pembimbing : Utami Sulistiana, S.P.,M.P

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Wajib melapor diri kepada pemerintah setempat ( Lurah ) atau kepala instansi untuk dapat mendapatkan petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan hasil laporan hasil penelitian sebanyak 1 ( satu ) eksemplar atau CD kepada Lurah Wonokerto.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan berakhirknya penelitian ini.





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI (SK BAN-PT No. 003-BAN-PT/Ak-XIII/SI/V/2010)

Jl. Timoho 317, Telp. (0274) 561971; Fax. (0274) 516989 – Yogyakarta 55225

**KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Eting Delfia Samaleisa  
**No Mahasiswa** : 21520016  
**Judul Skripsi** : Fasilitasi Pemerintah Kecilkan dalam Pengaruh Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Perempuan  
**Dosen Pembimbing** : Ummi Sulistiawati, S.P., M.P  
**Mulai Bimbingan** : Selasa 12 November 2024

Tanggal	Uraikan Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
12/11/2024	- Revisi katabalangan masalah - Pertanyaan des seir dan des siller lalu tunjukkan gap/ kesenjangannya	
19/11/2024	- Pertanyaan des seir dan des siller - gap / kesenjangan	
19/11/2024	- Fokus Penelitian - Manfaat Penelitian - Tujuan Penelitian - teknis analisis - dst.	
26/11/2024	- Jelaskan Metode Penelitian dg Pendekatan yg eksploratif - teknik penentuan informan - purposive - daffar pustaka - Pedoman wawancara menyesuaikan fokus	

11/02	ACC Proposal	
21/04	- BAB 2 - profil katuruhan wonokerlo - tabel, dll.	
17/06	- BAB I & IIISI SEMUANYA - Pendamaan wawancara	
23/06	ACC Skripsi	

Mengetahui / Menyetujui

Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi

Dosen Pembimbing

## Surat Bukti Hasil Cek Turnitin

